

***INTERACTIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KAMPUNG  
IKLIM (PROKLIM) DI KOTA MAKASSAR***



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik guna Memenuhi Salah  
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Administrasi Negara

OLEH :  
**ANITA SAID**  
NIM : 4518021052  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Interative Governance Dalam Program Kampung Iklim (Proklam) Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Anita Said

Nomor Stambuk : 4518021052

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 02 Februari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si  
NIDN. 091509 8603

  
Dr. Ade Ferry Afrisal, SH., M.SC  
NIDN. 0910128704

Mengetahui,

Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

  
Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si  
NIDN. 0905107005

  
Drs. Natsir Tompe, M.Si  
NIDN. 0901065901

## HALAMAN PENERIMAAN

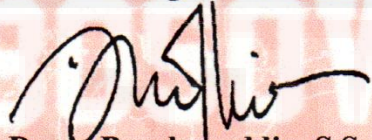
Pada hari Kamis Tanggal 02 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Interactive Governance Dalam Program Kampung Iklim (Proklim) Di Kota Makassar**

Nama : Anita Said  
Nomor Stambuk : 4518021052  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

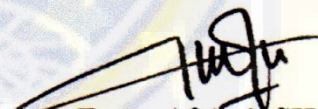
Makassar, 02 Februari 2023

**Pengawas Umum:**

  
Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

**Panitia Ujian :**

  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si  
Ketua

  
Dr. Ade Ferry Afrisal, SH., M.SC  
Sekretaris

**Tim Penguji :**

1. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
2. Dr. Ade Ferry Afrisal, SH., M.SC
3. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si
4. Didik Iskandar, S.Sos., M.Si

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Said  
Nomor mahasiswa : 4518021052  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Negara

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“Interactive Governance dalam Program Kampung Iklim (Proklim) di kota Makassar”.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas pembuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



ANITA SAID

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirabbil Alamin.* Segala puji syukur khadirat Allah SWT, berkat hidayah dan taufiq-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“Interactive Governance dalam Program Kampung Iklim (Proklim) di kota Makassar”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana. Salam serta shalawat penulis panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dan mengajarkan ajaran Islam yang terbukti kebenarannya.

Selama penulisan skripsi ini ada berbagai hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat petunjuk dan hidayah Allah SWT, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hasniah dan Ayahanda tersayang Muh. Said, dimana dengan berkah do'a tulusnya secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai. Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan baik. Kakakku yang tersayang Ridwan, Ismail, Seruni, Suriantidan adikku terkasih Hartika dan Pardiansa yang selalu membantu dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini.

1. Yth, Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.S Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.

2. Yth, Bapak Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar
3. Yth, Dr. Hj. Asmirah, M.Si Selaku Wakil Dekan 1 dan Zulkihair Burhan, S.Ip., M.A Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
4. Yth, Drs. Natsir Tompo, M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
5. Yth, Nining Haslinda Zainal.S.Sos.,M.Si. dan Ade Ferry, S.H., M.Sc selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa, yang telah mendidik dan mengajarkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku tercinta sedari SMA bersama (Tami, Safira, Mety) yang tak henti-hentinya mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada :

Teman-teman dari (Fika, Zalsa, April, Nanda, Olla), sebagai teman seperjuangan penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Kampus Universitas Bosowa.

*Billahi fisisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Makassar, 5 Oktober 2022

Anita Said

## ABSTRAK

ANITA SAID, 2022. *Interactive Governance dalam Program Kampung Iklim (Proklom) di kota Makassar*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa. Dibimbing oleh Nining Haslinda Zainal dan Ade Ferry.

Ketidakseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya penambahan penduduk serta pembangunan yang gencar dilakukan akan menimbulkan banyak masalah terutama pada penurunan gas emisi rumah kaca atau pemanasan global yang akan berdampak pada keseimbangan ekosistem. Gangguan tersebut berupa peningkatan suhu udara, krisis air bersih, dan meningkatnya wabah penyakit sehingga menyebabkan kondisi semakin kritis dan jauh dari keadaan yang ideal.

Lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama harus dijaga dan dilestarikan mengingat bahwa setiap manusia memiliki hak dasar untuk mendapatkan lingkungan yang bagus termasuk menghirup udara yang segar.

Sehingga Pemerintah terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebuah Program Kampung Iklim sebagai tujuan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dengan menyesuaikan diri melalui dua upaya yaitu Adaptasi dan Mitigasi dengan menciptakan kawasan ramah lingkungan yang dilakukan dengan beberapa kriteria yang bertujuan untuk mensejahterakan kondisi lokal disuatu wilayah.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan menginterventarisasi melalui beberapa lokasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah Program Kampung Iklim untuk melaksanakan sebuah program tersebut masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim berdampak baik terhadap masyarakat sekitar. Program Kampung Iklim di 3 lokasi yaitu RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea, RW 11 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang dan RW 05 Kel. Barombong Kec. Tamalate dianggap berhasil karena masyarakat melaksanakan melalui *interactive governance*.

**Kata kunci** : Program Kampung Iklim, *Interactive Governance*, Adaptasi dan Mitigasi.



## ABSTRACT

ANITA SAID, 2022. *Interactive Governance in the Climate Village Program (Proklim) in the city of Makassar*. Thesis of State Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Bosowa. Supervised by Nining Haslinda Zainal and Ade Ferry.

*Environmental imbalances caused by population growth and intensive development will cause many problems, especially in reducing greenhouse gas emissions or global warming which will have an impact on the balance of the ecosystem. These disturbances are in the form of an increase in air temperature, a clean water crisis, and an increase in disease outbreaks, causing conditions to become increasingly critical and far from ideal.*

*The environment which is a shared responsibility must be maintained and preserved considering that every human being has a basic right to a good environment, including breathing fresh air. So that the Government, especially the Ministry of Environment and Forestry issued a Climate Village Program as a goal to overcome the impacts of climate change by adapting through two efforts, namely Adaptation and Mitigation by creating environmentally friendly areas carried out with several criteria that aim to prosper local conditions in an area.*

*The Environmental Management Office of South Sulawesi Province (DPLH SULSEL) carries out the delegation of authority by conducting an inventory through several locations in accordance with the terms and conditions that apply in a Climate Village Program to implement a program that the community must actively participate in its implementation.*

*This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Climate Village Program has a good impact on the surrounding community. Climate Village Program in 3 locations, namely RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea, RW 11 Ex. Tello Baru Kec. Panakkukang and RW 05 Kel. Barombong Kec. Tamalate is considered successful because the community implements it through interactive governance.*

**Keywords** : *Climate Village Program, Interactive Governance, Adaptation and Mitigation.*

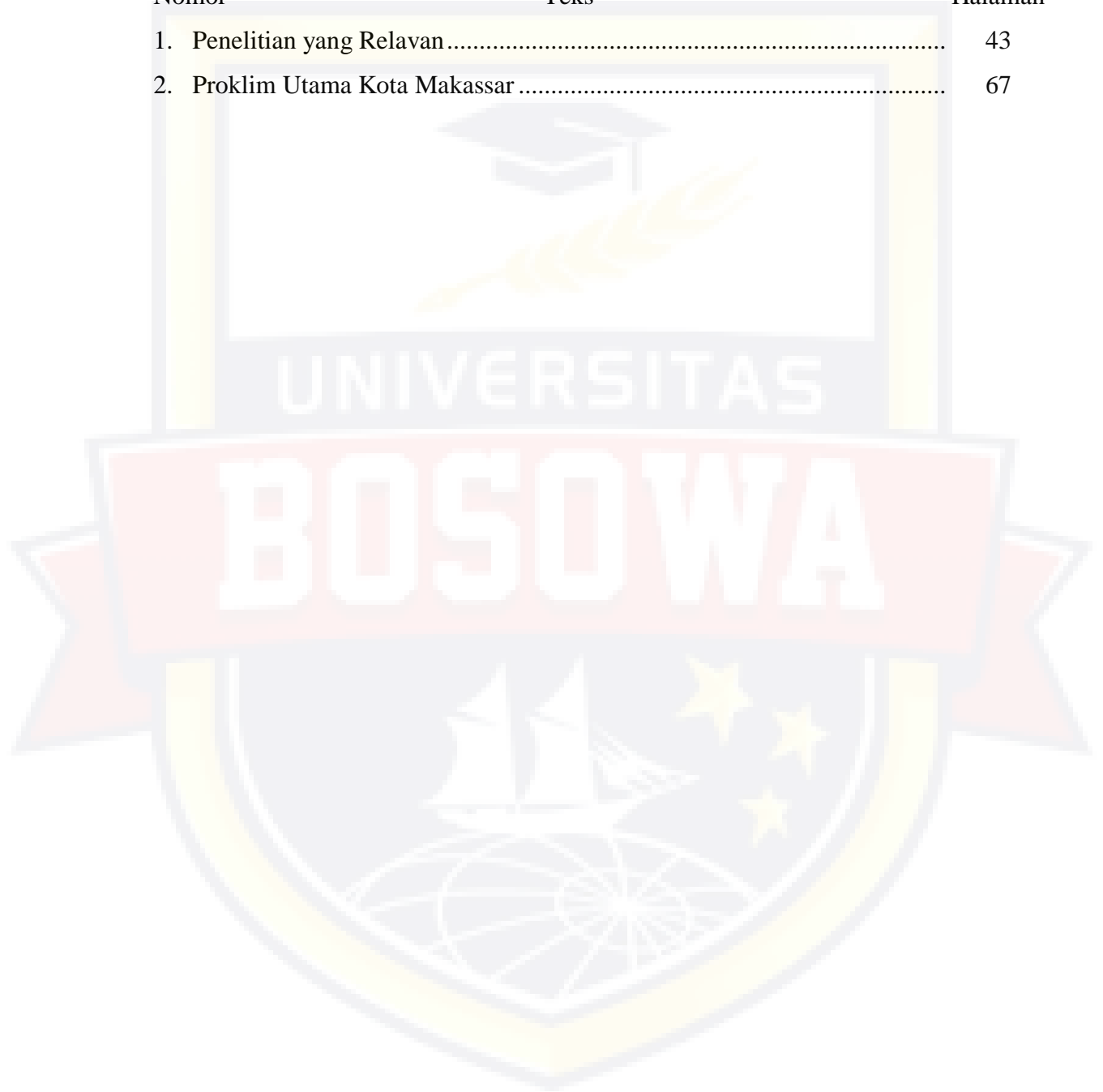
## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORSINALITAS</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumus Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tinjauan Teori .....	12
B. Penelitian Terdahulu .....	43
C. Kerangka Konseptual Penelitian .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	50
A. Pendekatan Penelitian .....	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50
C. Jenis dan Sumber Data .....	51
D. Informan Penelitian .....	51

E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Metode Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Tempat Meneliti .....	56
1. Geografis dan Demografis Kota Makassar .....	56
2. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan .....	57
a. Sejarah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan .	57
b. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.....	58
c. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.....	59
d. Uraian tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.....	60
B. Hasil Penelitian .....	66
1. Bentuk Interactive Governance dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di kota makassar.....	67
a. Pemerintah.....	67
b. Proklim dalam Adaptasi .....	70
c. Proklim dalam Mitigasi.....	71
2. Partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL).....	73
C. Pembahasan.....	75
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
A. Simpulan .....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

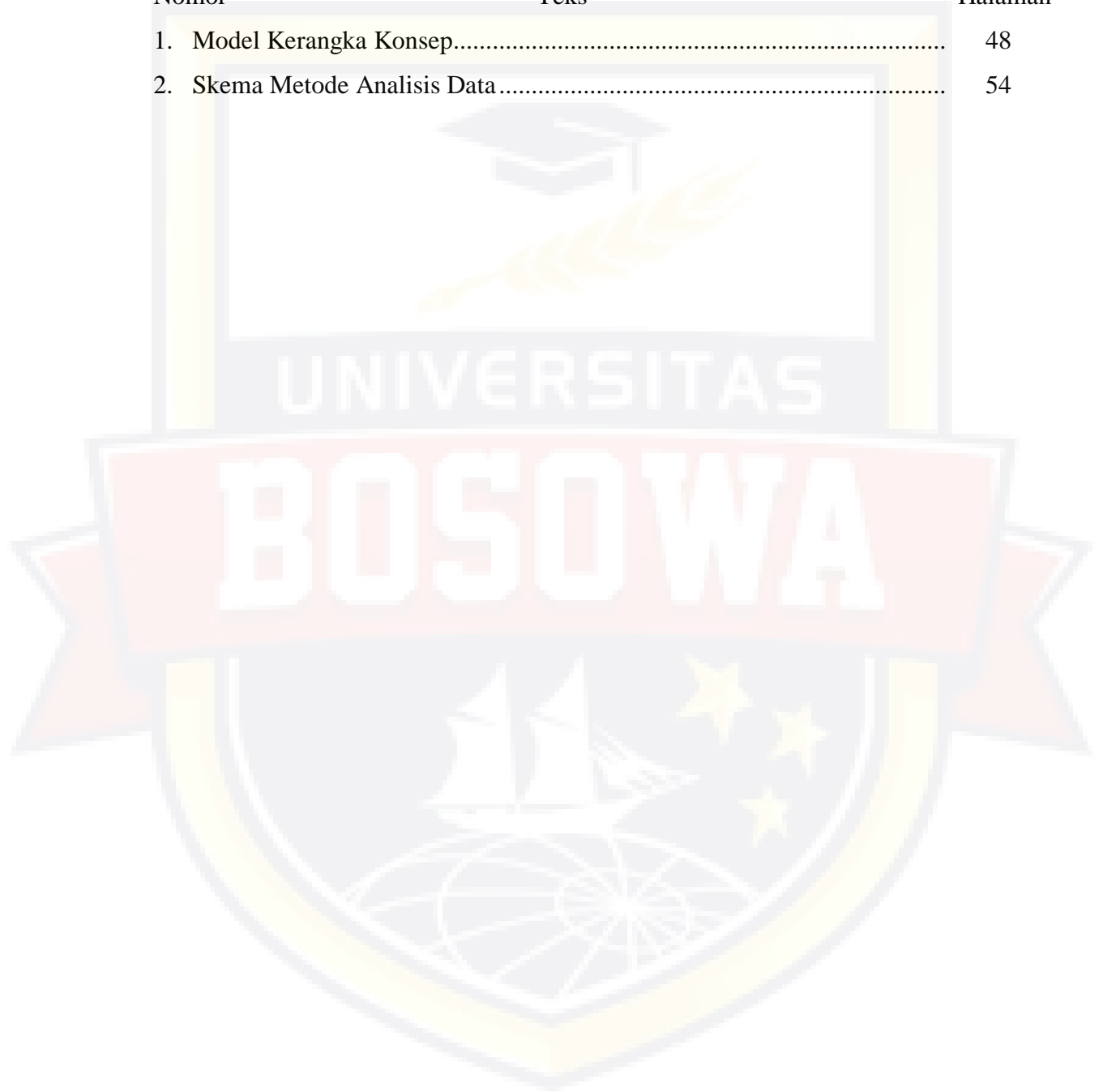
## DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Penelitian yang Relavan.....	43
2.	Proklamasi Utama Kota Makassar .....	67



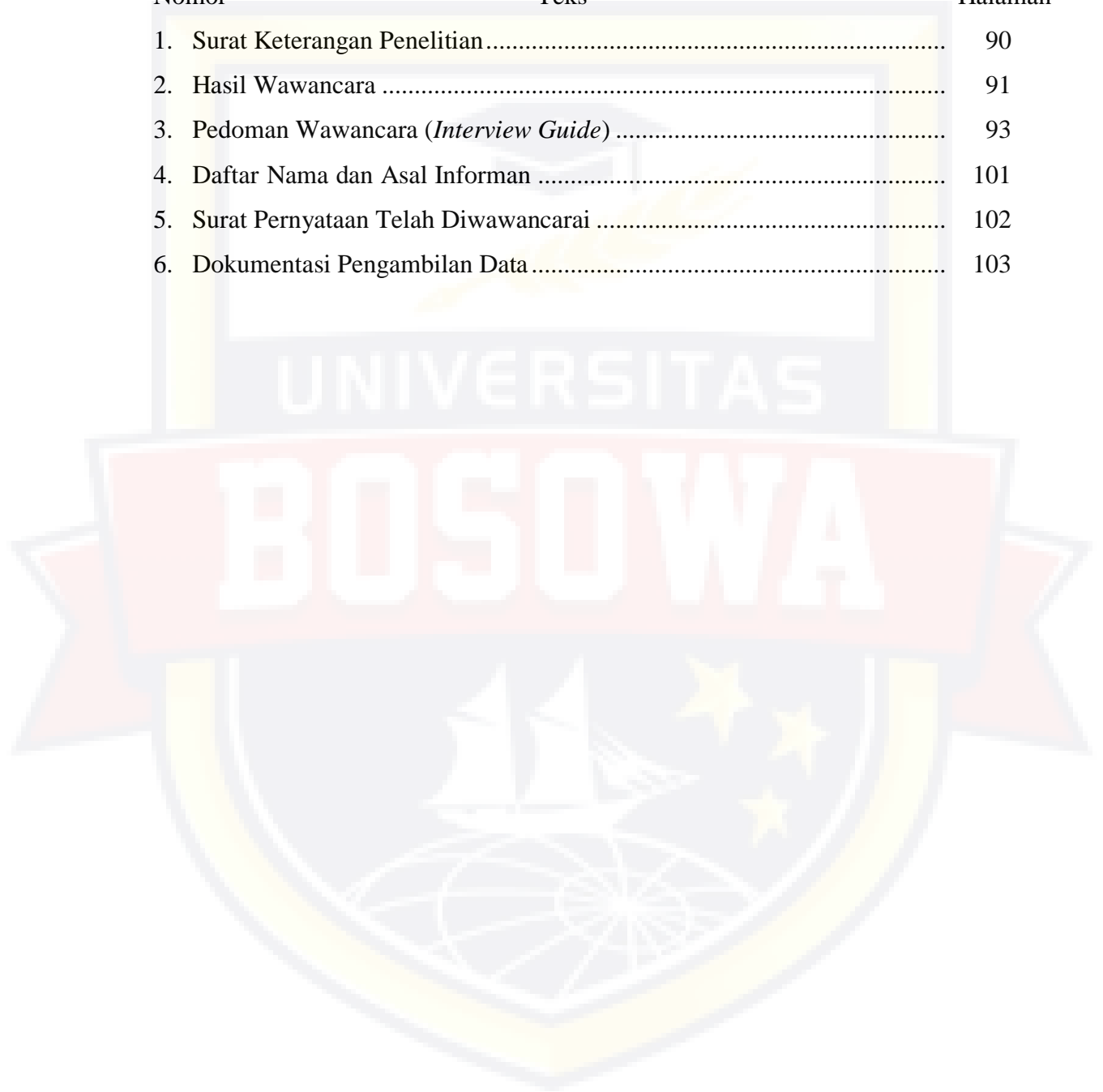
## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Model Kerangka Konsep.....	48
2.	Skema Metode Analisis Data.....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Surat Keterangan Penelitian.....	90
2.	Hasil Wawancara .....	91
3.	Pedoman Wawancara ( <i>Interview Guide</i> ) .....	93
4.	Daftar Nama dan Asal Informan .....	101
5.	Surat Pernyataan Telah Diwawancarai .....	102
6.	Dokumentasi Pengambilan Data .....	103



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan kata “*governance*” menjadi perbendaharaan yang banyak digunakan dalam diskusi administrasi pembangunan dan demokrasi. *Governance* mengacu pada perubahan makna dari *government* atau pemerintah menjadi sebuah proses pemerintahan yang baru, jenis politik yang baru, sebuah cara yang baru dalam memecahkan masalah kebijakan dan metode baru untuk mengatur masyarakat. *Governance* juga mengacu pada hasil atau hasil bersama yang dicapai melalui interaksi aktor yang berbeda. (Rhodes, R.A.W, 1996).

Ini berarti bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan publik tidak lagi semata-mata hanya urusan pemerintah saja tetapi dengan keterlibatan berbagai aktor non-pemerintahan yang relevan seperti LSM, perusahaan swasta, maupun warga negara. Dalam banyak *literatur governance* terdapat empat makna dominan dari istilah *governance* yaitu *governance as good governance or as corporate governance; governance as new public management; governance as multi-level governance or inter-governmental relations; dan governance as network governance*. Dari keempat konsep diatas, semuanya menekankan pada proses pemerintahan daripada struktur pemerintah. (Klijn e.h & Koppenjan, J, 2016).

Perspektif *governance* pada dasarnya merupakan proses pembuatan kebijakan, dimana semua prosesnya melibatkan unsur pemerintahan, yaitu

pemerintah yang berperan untuk menciptakan suasana sosial dan politik yang kondusif. Sektor swasta berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, dan juga masyarakat yang berperan untuk memfasilitasi interaksi sosial dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, politik dan sosial. (Syamsurizaldi & dkk, 2019).

Governance dalam bidang kebijakan publik biasanya terkait dengan hukum dan sistem formal yang disediakan oleh pemerintah di berbagai tingkatan, tetapi muncul realitas baru yang mengatakan bahwa tindakan sepihak sekarang ini semakin digantikan oleh “*interactive forms of governance*” where steering, control, and coordination are result of many hands rather than the iron fist of government”. Dalam bukunya Torfing et al mengatakan bahwa *Interactive Governance* merupakan sebuah proses yang kompleks dimana sejumlah aktor sosial dan politik berinteraksi dengan kepentingan yang berbeda untuk merumuskan, mempromosikan, dan mencapai tujuan bersama dengan cara memobilisasi, bertukar dan menyebarkan berbagai ide, aturan, dan sumber daya. (Torfing, J., B.G. Peters, J. Pierre and E. Sorensen, 2012).

Isu governance tidak lepas dari *Interactive Governance* karena, *Interactive Governance* atau pemerintahan yang interaktif merupakan salah satu tipe dari konsep governance yang menitikberatkan kepada keterlibatan aktor-aktor lain diluar pemerintah yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang terjadi dan memiliki kapabilitas untuk menemukan



solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Salah satu bentuk pemerintahan yang interaktif yaitu pemerintahan yang berjejaring, yang mana dalam perspektif networks struktur relasi antar organisasi bersifat lentur dan tidak terikat secara permanen dalam proses kerjasama sehingga hubungan tersebut diikat atas dasar kepercayaan. (Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. Eds, 2016).

*Proliferasi* bentuk pemerintahan interaktif atau *Interactive Governance* adalah hasil dari strategi dan keputusan *ad hoc* di pihak pembuat keputusan publik yang menyadari bahwa ruang lingkup tindakan sepihak semakin mengecil dan merespon tekanan dari pihak swasta yang semakin berkompeten dan menuntut pihak-pihak yang ingin berperan aktif bagian dalam pengambilan keputusan publik (Warren, 2002, 2009).

Diakui secara luas bahwa bentuk-bentuk pemerintahan yang interaktif adalah difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi baru dan tingkat pendidikan populer yang berkembang dan profesionalisasi pemangku kepentingan yang terorganisir (Goldsmith dan Eggers, 2004). Akhirnya, tampaknya ada sedikit keraguan bahwa pemerintahan interaktif dapat meningkatkan kepemilikan inisiatif kebijakan publik dan membantu menghasilkan legitimasi demokratis (Skelcher dan Torfing, 2010). Karena *trend* sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari kemungkinan akan terus berlanjut di masa depan, kita dapat menyimpulkan bahwa tata kelola interaktif akan tetap ada dan kemungkinan akan memainkan peran yang meningkat di masa depan.

Selain melihat dari sudut pandang *Interactive Governance* atau interaksi pemerintah juga besar kaitannya dengan *aktivitas* manusia atau masyarakat, dimana kaitannya tersebut berdampak melalui perubahan iklim yang merupakan berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh *aktivitas* manusia. Hal tersebut dapat diamati melalui perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban, angin, tutupan awan dan penguapan. Perubahan iklim berdampak pada ekosistem dan manusia di seluruh bagian benua dan samudera di dunia. Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan, dan pembangunan ekonomi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017:1).

Perubahan iklim (*climate changes*) merupakan salah satu fenomena alam dimana terjadi secara alamiah maupun yang dipercepat akibat aktifitas manusia. Sejak revolusi industri dimulai hingga sekarang telah menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara global. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan anomali iklim seperti fenomena *El-Nino* dan *La-Nina*, penurunan atau peningkatan suhu udara secara ekstrem, curah hujan dan musim bergeser dari pola biasanya dan tidak menentu serta permukaan air laut meningkat dan terjadinya rob di beberapa wilayah (Nurdin, 2011).

Menanggapi persoalan perubahan iklim saat ini, Indonesia bersama dunia Internasional turut serta dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Sebanyak 181 Negara anggota *United Nations Framework Covention on Climate Change* (UNFCCC) menyetujui agenda *Sustainable Development*

*Goals* (SDGS) yang berisikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang salah satu poinnya terdapat pada tujuan nomor 13 mengenai penanganan perubahan iklim (Kominfo.go.id, 2016). Selain itu anggota UNFCCC telah menetapkan komitmen untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global tidak lebih dari 2°C, diatas tingkat pasca masa pra industrialisasi, dengan ambisi lebih lanjut untuk menekan kenaikan suhu sebesar 1,5°C, seperti yang telah tertuang dalam Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang disahkan di Paris pada tahun 2015 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017:2). Kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan.

Ditegaskan dalam Kesepakatan Paris bahwa gaya hidup dan pola konsumsi-produksi berkelanjutan memegang peranan penting dalam penanganan perubahan iklim serta investasi menuju masa depan yang rendah karbon, berketahanan iklim, dan berkelanjutan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah meretifikasi (*Paris Agreement*) melalui sebuah Kebijakan Nasional dengan dicetuskannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Selanjutnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebuah program yaitu Program Kampung Iklim (ProKlim) pada tahun 2011 dan telah dilaksanakan sejak tahun 2012 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017:6).

Munculnya pemerintahan interaktif dalam menyikapi perubahan iklim tampaknya telah menghasilkan sejumlah perubahan *irreversible*. Salah satunya yaitu harapan individu dan pemangku kepentingan yang terorganisir secara kolektif dalam menyudutkan program kampung iklim sebagai langkah awal menciptakan kampung yang terorganisir, dijelaskan bahwa kampung iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga (RW) atau dusun yang paling tinggi setingkat kelurahan atau desa dan wilayah masyarakatnya yang telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017:9). Sedangkan, Proklam merupakan kegiatan yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif dan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah.

Keterlibatan para pemangku kepentingan apabila berjalan dengan efektif serta dengan adanya pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan di tingkat tapak adalah salah satu aspek penting demi tercapainya target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional ataupun di tingkat global. Pemahaman mengenai tingkat kerentanan potensi dampak dan proyeksi iklim dengan bertambahnya suhu permukaan bumi perlu dibangun, sehingga masyarakat mampu memilih jenis aksi adaptasi yang diperlukan dan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam pelaksanaan proklam, penguatan aksi adaptasi perubahan iklim di

tingkat tapak merupakan hal yang sangat diperlukan terutama pada daerah yang teridentifikasi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada saat kerentanan dapat teratasi dengan upaya peningkatan kapasitas adaptasi yang kemudian akan menjadi sesuatu hal yang dilakukan masyarakat dalam kesehariannya, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan (*resiliensi*) terhadap perubahan iklim.

Landasan hukum ProKlim yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang program kampung iklim dan telah ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Pengertian program kampung iklim menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 84 Pasal 1 Tahun 2016 adalah:

“Program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayahnya”.

Salah satu bentuk dari penerapan Program Kampung Iklim (ProKlim) juga diterapkan di Kota Makassar yakni di RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec.

Tamalanrea, RW 11 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang dan RW 05 Kel. Barombong Kec. Tamalate. Program ini bertujuan untuk mengatasi atau mencegah agar perubahan iklim dapat berubah secara ekstrim dengan menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kota Makassar di jalankan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar yang merupakan usulan baru program ini dalam konsep *interaktif governance* menarik untuk dicermati atau diteliti untuk melihat pola interaksi pemerintah dengan *stakeholders* dalam menyusun atau menjalankan program ini.

Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang dipedesaan maupun perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak. Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan nasional kita. Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan. Dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturan aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah.

Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administratif. Dengan pendekatan ini, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas : (a) penataan ruang wilayah nasional; (b) penataan ruang wilayah provinsi; (c) penataan ruang wilayahkabupaten; (d) penataan ruang wilayah kota, yang setiap wilayah ini merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif, apabila tidak ditata dengan baik maka dapat mendorong ke arah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.

Banyak yang diketahui tentang fungsi bentuk pemerintahan dan pasar telah diteliti dengan cermat. Sebagai perbandingan, ada banyak jalan penelitian yang belum dijelajahi di dalam paradigma pemerintahan interaktif. Dalam menghadapi perubahan iklim diperlukan suatu strategi yang dapat meminimalisir dan mencegah dampak yang akan terjadi. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong seluruh pihak dalam melaksanakan aksi nyata menghadapi Perubahan Iklim. Program ini digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2010 yang tercantum dalam Peraturan Menteri No.19 Tahun 2012 tentang “Program Kampung Iklim (ProKlim)”. Melalui pelaksanaan Proklim diharapkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya meningkat, sehingga terdorong melaksanakan upaya adaptasi yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat

menghadapi perubahan iklim serta upaya *mitigasi* yang dapat memberikan kontribusi terhadap partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar.

## **B. Rumus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk *Interactive Governance* dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di kota makassar?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan atas adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk *Interactive Governance* dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di kota makassar.
2. Untuk mengetahui, pendeskripsian, dan analisis hasil partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan ilmu pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengetahui kondisi perubahan iklim dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
2. Bagi masyarakat. Manfaat Praktis, Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang.
3. Untuk peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan dalam pengembangan *Interactive Governance* Dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Teori *Governance*

###### a. Pengertian *Governance*

Pergeseran konsep “*government*” to “*governance*” menyiratkan lebih sedikit pemerintah tetapi lebih banyak pemerintahan atau “*more steering*”. Fragmentasi dari pemerintah ini berarti berkurangnya kontrol pemerintah dalam pengambilan keputusan dan implementasi. Ini dikarenakan pemerintah berinteraksi dengan aktor-aktor lain yaitu sektor publik (*public sector*), sektor *private* (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*) yang bertujuan untuk pertukaran sumber daya dalam memberikan pelayanan publik. (Martinez & Laia, 2011). Ketiga komponen tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat, dan dengan keseimbangan tersebut maka akan terwujudnya keterlibatan aktor non pemerintah dalam tata kelola pemerintahan. Namun, keterlibatan disini bukanlah sebagai pemegang kendali atas pemerintahan, akan tetapi keterlibatan yang dimaksud yaitu pemenuhan kebutuhan publik sesuai dengan segmentasi kemampuan aktor.

Isu *governance* di Indonesia saat ini erat kaitannya dengan proses desentralisasi, yang mana sekarang ini lebih terfokus kepada *governance* di tingkat lokal. (Syamsurizaldi & dkk, 2019). Kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau daerah atau desa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor penting untuk keberhasilan pembangunan

yaitu adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Jika pembangunan melibatkan peran serta masyarakat maka pembangunan tersebut akan lebih efektif, karena masyarakatlah yang memahami kondisi, potensi permasalahan dan kapasitas lokal maka dengan demikian kebutuhan dan kepentingan lokal akan lebih dapat teridentifikasi dan terakomodasi. (Indrawijaya, Adam Ibrahim, dkk, 2011).

Perspektif *governance* pada dasarnya merupakan proses pembuatan kebijakan, dimana semua prosesnya melibatkan unsur pemerintahan, yaitu pemerintah yang berperan untuk menciptakan suasana sosial dan politik yang kondusif. Sektor swasta berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, dan juga masyarakat yang berperan untuk memfasilitasi interaksi sosial dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, politik dan sosial. (Syamsurizaldi & dkk, 2019).

*Governance* dalam bidang kebijakan publik biasanya terkait dengan hukum dan sistem formal yang disediakan oleh pemerintah di berbagai tingkatan, tetapi muncul realitas baru yang mengatakan bahwa tindakan sepihak sekarang ini semakin digantikan oleh “*interactive forms of governance*” where steering, control, and coordination are result of many hands rather than the iron fist of government”. Dalam bukunya Torfing et al mengatakan bahwa *Interactive Governance* merupakan sebuah proses yang kompleks dimana sejumlah aktor sosial dan politik berinteraksi dengan kepentingan yang berbeda untuk merumuskan, mempromosikan, dan mencapai tujuan bersama dengan cara memobilisasi,

bertukar dan menyebarkan berbagai ide, aturan, dan sumber daya. (Torfing, J., B.G. Peters, J. Pierre and E. Sorensen, 2012).

## **2. *Interactive Governance***

### **a. Pengertian *Interactive Governance***

Isu *governance* di Indonesia saat ini erat kaitannya dengan proses desentralisasi, yang mana sekarang ini lebih terfokus kepada *governance* di tingkat lokal. (Syamsurizaldi & dkk, 2019). Kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau daerah atau desa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor penting untuk keberhasilan pembangunan yaitu adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Jika pembangunan melibatkan peran serta masyarakat maka pembangunan tersebut akan lebih efektif, karena masyarakatlah yang memahami kondisi, potensi permasalahan dan kapasitas lokal maka dengan demikian kebutuhan dan kepentingan lokal akan lebih dapat teridentifikasi dan terakomodasi. (Indrawijaya, Adam Ibrahim, dkk, 2011).

*Interactive Governance* atau pemerintahan yang interaktif merupakan salah satu tipe dari konsep *governance* yang menitik beratkan kepada keterlibatan aktor-aktor lain diluar pemerintah yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang terjadi dan memiliki *kapabilitas* untuk menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Salah satu bentuk pemerintahan yang interaktif yaitu pemerintahan yang berjejaring, yang mana dalam perspektif *networks*, struktur relasi antar organisasi bersifat lentur dan tidak terikat secara

permanen dalam proses kerjasama sehingga hubungan tersebut diikat atas dasar kepercayaan. (Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. Eds, 2016).

*Proliferasi* bentuk pemerintahan interaktif adalah hasil dari strategi dan keputusan *ad hoc* di pihak pembuat keputusan publik yang menyadari bahwa ruang lingkup tindakan sepihak semakin mengecil dan merespon tekanan dari pihak swasta yang semakin berkompeten dan menuntut pihak-pihak yang ingin berperan aktif bagian dalam pengambilan keputusan publik (Warren, 2002, 2009). Ini adalah pengalaman sehari-hari di antara para pembuat keputusan publik di berbagai tingkatan yang mengatur masyarakat dan perekonomian melalui *top-down steering* menjadi semakin sulit karena semakin kompleksnya masalah kebijakan, diferensiasi fungsional masyarakat, meningkatnya saling ketergantungan antara sosial dan aktor politik, dan ketidakpastian strategis yang disebabkan oleh globalisasi dan bertentangan dengan tuntutan publik yang meningkat (Kooiman, 2003; Koppenjan dan Klijn, 2004). Juga diakui secara luas bahwa bentuk-bentuk pemerintahan yang interaktif adalah difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi baru dan tingkat pendidikan populer yang berkembang dan profesionalisasi pemangku kepentingan yang terorganisir (Goldsmith dan Eggers, 2004).

Akhirnya, tampaknya ada sedikit keraguan bahwa pemerintahan interaktif dapat meningkatkan kepemilikan inisiatif kebijakan publik dan membantu menghasilkan legitimasi demokratis (Skelcher dan Torfing, 2010). Karena *trend* sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari kemungkinan akan terus berlanjut di masa depan, kita dapat

menyimpulkan bahwa tata kelola interaktif akan tetap ada dan kemungkinan akan memainkan peran yang meningkat di masa depan.

Munculnya pemerintahan interaktif tampaknya telah menghasilkan sejumlah perubahan *ireversibel*. Pertama, harapan individu dan pemangku kepentingan yang terorganisir secara *kolektif* untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan kebijakan interaktif telah meningkat dan dipercepat oleh politik pemberdayaan pemangku kepentingan, yang merupakan efek dari partisipasi mereka di arena pemerintahan *kolaboratif*. *Resesi* ekonomi mungkin menambah peran pemerintah yang bertujuan untuk memastikan disiplin fiskal, tetapi harapan aktor yang relevan dan terpengaruh untuk terlibat dalam upaya untuk memecahkan semakin banyak masalah jahat akan bertahan. (Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. Eds, 2016).

Kedua, lembaga publik telah berubah dari yang relatif terisolasi birokrasi ke organisasi yang relatif terbuka yang terlibat dalam negosiasi interaksi, pemecahan masalah bersama, dan pemberian layanan kolaboratif. Tata kelola interaktif telah menjadi kegiatan yang sistematis dan terintegrasi dengan baik yang berlangsung atas dasar aturan main yang dilembagakan dan membutuhkan pemantauan dan pengelolaan terus-menerus melalui berbagai bentuk *metagovernance*. Transformasi kelembagaan birokrasi publik telah mengubah logika tindakan yang tepat sehingga banyak administrator publik memahami desain, manajemen, dan arah arena kolaboratif sebagai tugas yang perlu dan sah. Partisipasi dalam pemerintahan interaktif pengaturan juga tampaknya mempengaruhi

organisasi birokrasi publik Perdebatan tata kelola dan kebangkitan tata kelola interaktif yang cenderung memecah silo dan mengalihkan kekuasaan dan kompetensi untuk manajer menengah dan birokrat tingkat jalanan. Namun, pendulum mungkin berayun kembali ke arah penilaian kembali etos birokrasi klasik dalam hal profesionalisme, imparialitas, transparansi, dan akuntabilitas (Du Gay, 2000; Olsen, 2002), tetapi kembali ke organisasi birokrasi mandiri yang hanya berinteraksi dengan lingkungan eksternal sebagai aktor yang dibatasi adalah tidak mungkin dalam menghadapi kebutuhan sektor publik untuk memobilisasi pengetahuan, ide, dan sumber daya dari sejumlah pemangku kepentingan.

Ketiga, persepsi tata kelola interaktif sebagai alternatif yang sah untuk hirarki dan pasar berarti bahwa pemerintahan telah menjadi lebih reflektif perusahaan yang didasarkan pada pilihan yang bergantung pada konteks dan spesifik masalah kombinasi tertentu dari mekanisme tata kelola. Mungkin ada situasi di mana kontrol hierarkis atau persaingan pasar tampak jelas pilihan, tetapi bentuk pemerintahan interaktif akan menjadi kandidat yang kuat di bidang kebijakan yang dicirikan oleh ketidakpastian, konflik, dan kebutuhan untuk menyatukan atau pertukaran sumber daya. Bias ideologis dapat mempengaruhi pilihan pembuat keputusan politik tentang mekanisme pemerintahan sebagai pembela yang kuat dari kesejahteraan negara akan cenderung memiliki preferensi yang kuat untuk tata kelola hierarkis dan kritikus liberal negara kesejahteraan akan cenderung memiliki preferensi yang kuat untuk tata kelola pasar.

Namun, dalam situasi di mana baik *hierarki* atau pasar gagal, tata kelola interaktif akan menjadi opsi *default* yang mungkin menghasilkan solusi yang tidak terduga.

### **3. Partisipasi Masyarakat**

#### **a. Teori Partisipasi Masyarakat**

Sebelum memasuki apa yang dimaksudkan dengan partisipasi masyarakat, maka terlebih dahulu perlu memahami apakah yang dimaksud partisipasi dan apakah yang dimaksud masyarakat. Dalam hal ini, kata partisipasi menunjuk pada dua hal yaitu apakah yang dimaksud dengan masyarakat, serta bagaimana posisi masyarakat dalam pemerintahan daerah.

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu atau segolongan orang yang memiliki kesamaan tertentu”. Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* Masyarakat (*Society*) is “*a community of people, as of a state, nation, or locality, with common cultures, traditions, and interests*”. Sedangkan Korten dan Khairul Muluk menjelaskan istilah masyarakat secara populer merujuk pada sekumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, namun pada akhirnya, ia kemudian merujuk pada pengertian yang berasal dari dunia ekologi dengan menerjemahkan masyarakat sebagai “*an interacting population of organism (individuals) living in a common location*”.



Sejalan dengan pengertian tersebut dengan mengutip pendapat Darwin, maka dalam tulisan ini masyarakat dimaknai sebagai fenomena yang jamak, dalam arti bahwa tidak ada satupun dari anggota masyarakat atau institusi dalam masyarakat yang secara *hegemonis* menjadi wakil dari anggota masyarakat lainnya dan meminggirkan pihak lain yang ingin mengartikulasikan kepentingannya. Menurut Darwin, yang termasuk dalam pengertian masyarakat di sini adalah pribadi, perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa. Masyarakat merupakan jaringan semua komponen tersebut.

Selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan istilah partisipasi. Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta”. Sedangkan dalam *Black's Laws Dictionary* Participation is “the act of taking part in something, ....”. Kemudian Rahnema mengutip pengertian partisipasi dalam the *Oxford Dictionary* sebagai “the action or fact of partaking, having or forming a part of”.

Dalam pengertian ini, partisipasi bisa bersifat *transitif* atau *intransitif*, bisa pula bermoral atau tak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif atau spontan. Partisipasi bersifat *transitif* apabila ia berorientasi pada tujuan tertentu, dan sebaliknya partisipasi bersifat *intransitif* apabila subjek tertentu berperan serta dengan tanpa tujuan yang jelas. Partisipasi bersifat moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai

dengan etika, begitu pula dengan sebaliknya apabila tidak sesuai dengan etika maka partisipasi tersebut tidak bermoral.

Selain itu untuk memahami apa yang dimaksud sebagai partisipasi secara utuh, maka pertama-tama perlu diketahui terlebih dahulu pengertian partisipasi politik. Samuel P Huntington dan Joan Nelson memberikan definisi mengenai partisipasi politik yaitu *“we define political participation simply as activity by private citizen designed to influence governmental decision-making”*. Dari rumusan tersebut maka tampak bahwa substansi partisipasi adalah kegiatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, tanpa melihat bentuk, sifat dan hasil dari partisipasi yang dilakukannya.

Samuel P Huntington dan Joan Nelson mengemukakan bahwa dalam definisi tersebut mengandung empat hal pokok yaitu: Pertama, partisipasi adalah mencakup kegiatan-kegiatan, dan tidak memasukkan di dalamnya sikap-sikap terhadap orientasi politik. Kedua, partisipasi adalah kegiatan politik warga negara biasa atau tepatnya perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara. Artinya bukan kegiatan orang-orang yang memang berkecimpung dalam profesi politik atau pemerintahan. Ketiga, partisipasi adalah hanya merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Keempat, partisipasi mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tidak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek itu.

Keempat hal pokok tersebut menuntut masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan yang berpangkal pada adanya *desirability* (hasrat/keinginan) dari masyarakat untuk mewujudkan *self-government*.

#### **b. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan**

Dari berbagai pengertian di atas tentunya belum begitu jelas mengenai apa yang dimaksudkan dengan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini Korten berpendapat bahwa partisipasi masyarakat berkonotasi “*the direct involvement of ordinary people in local affair*”, yang selanjutnya diperjelas oleh Midgley dengan mengacu pada pengertian partisipasi masyarakat dalam salah satu resolusi PBB pada awal tahun 1970-an. Defenisi tersebut adalah “*the creation of opportunities to enable all members of a community and the larger society to actively contribute to and influence the development process and to share equitably in the fruits of development*”.

Mengenai batasan apa yang tercakup dalam partisipasi masyarakat, Midgley mengungkapkan pandangannya, yaitu berdasar pada *United Nations Economic and Social Council Resolution 1929*. Resolusi ini menyatakan bahwa partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang secara suka rela dan demokratis dalam hal:

- 1) Sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan;
- 2) Penerimaan manfaat secara merata;

3) Pengambilan keputusan yang menyangkut penetapan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, dan penerapan program pembangunan sosial ekonomi.

Mengacu pada pandangan ini partisipasi dibedakan dalam dua hal yaitu partisipasi autentik (*authentic participation*) yang merujuk pada terpenuhinya ketiga kriteria yang ada di atas. Jika semua kriteria tersebut tidak dipenuhi maka disebut dengan partisipasi semu (*pseudo-participation*). Pada tahun 1981 PBB mengajukan pandangan yang berbeda tentang definisi partisipasi masyarakat yang menekankan pada “*autonomy and self-reliance in participation*”, karena partisipasi autentik dianggap terlalu ambisius karena membutuhkan perubahan struktur sosial yang nyata dan redistribusi kekuasaan besar-besaran yang tentunya sulit untuk dipenuhi oleh banyak negara berkembang.

Secara sederhana Goulet, menyebut partisipasi sebagai suatu cara melakukan interaksi antar dua kelompok. Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*elite*).

Dengan mempertimbangkan berbagai uraian di atas maka, partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat. Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa partisipasi dalam arti luas mencakup pula *involvement* (keterlibatan) dan *empowerment* (pemberdayaan).

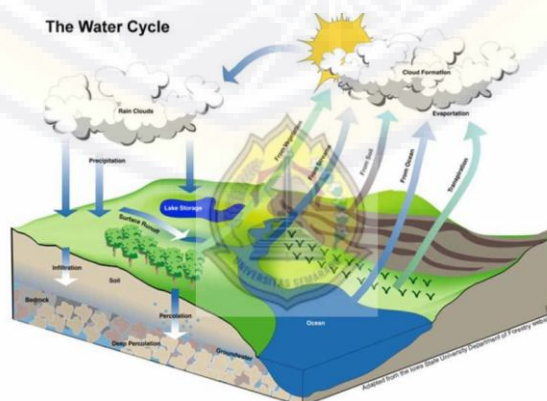
#### 4. Hubungan Lingkungan Terhadap Iklim

##### a. Ekosistem

Ekosistem adalah suatu kesatuan faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Sesuai dengan definisi diatas iklim yang merupakan faktor abiotik akan mempengaruhi faktor biotik (mahluk hidup). Menurut Smith (2000) dalam Surakusumah (2008) Iklim hampir mempengaruhi semua aspek ekosistem antara lain respon fisiologi dan perilaku mahluk hidup, kelahiran, kematian dan pertumbuhan populasi, kemampuan kompetisi spesies, struktur komunitas, produktivitas dan siklus nutrisi.

Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus menerus. Air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan batu, hujan es dan salju (*sleet*), hujan gerimis atau kabut. Berikut ini siklus hidrologi dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1**  
**Siklus Hidrologi**



Dari gambar diatas menunjukkan beberapa proses yang terjadi dalam siklus hidrologi. Untuk menjaga siklus hidrologi agar komponen utamanya dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka perlu dipertahankan kesetimbangan melalui proses pengisian air hujan dengan meresapkannya ke dalam pori-pori/rongga tanah, batuan atau yang disebut dengan upaya konservasi air. (Sri Harto Br, 1993).

#### **b. Perubahan Iklim**

Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca yang merupakan interaksi yang kompleks antara proses-proses fisik, kimia, biologi yang mencerminkan interaksi antara geosfer, biosfer yang terjadi pada atmosfer bumi. Karena itu iklim suatu tempat atau wilayah merupakan deskripsi statistik tentang kondisi atmosfer dalam jangka waktu yang panjang sehingga menggambarkan rata-rata variabel cuaca (Murdiyarso, 2014).

Cuaca berubah sepanjang waktu, iklim biasanya akan sama berabad-abad jika tidak diganggu. Tetapi, bumi tidak dibiarkan sendirian. Manusia melakukan aktivitas yang signifikan sehingga mengubah bumi dan iklimnya. Perubahan iklim disebabkan oleh efek gas rumah kaca (GRK), yaitu gas-gas hasil emisi yang terakumulasi di stratosfer.

Iklim (climate) adalah sintesis atau kesimpulan dari perubahan nilai unsur-unsur cuaca (hari demi hari dan bulan demi bulan) dalam jangka panjang di suatu tempat atau pada suatu wilayah. *Sintesis* tersebut dapat diartikan pula sebagai nilai statistik yang meliputi: rata-rata, maksimum, minimum, frekuensi kejadian. Iklim sering dikatakan sebagai nilai statistik

cuaca jangka panjang di suatu tempat atau suatu wilayah. Iklim dapat pula diartikan sebagai sifat cuaca di suatu tempat atau wilayah. Data iklim terdiri dari data diskontinu (radiasi, lama penyinaran matahari, presipitasi dan penguapan) dan data kontinu (suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin) (Atmaja, 2017).

Menurut Kartasapoetra (2012) iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang sifatnya tetap. Gibbs (1987) dalam Rosalina (2012) menyatakan iklim sebagai peluang statistik berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu, tekanan, angin, kelembaban, yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Menurut Diposaptono (2011), perubahan iklim dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya keadaan iklim yang ekstrim, sehingga memunculkan banyak peristiwa alam, seperti badai, kekeringan, banjir, dan lain-lain. Selain itu, perubahan iklim dapat meningkatkan suhu permukaan air laut. Pemanasan global akan mengakibatkan perubahan iklim dan mempengaruhi sektor pertanian. Secara teknis, kerentanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dan sifat tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air dan tanaman, serta varietas tanaman. Perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif maupun positif terhadap sektor pertanian. (Las et al. 2008)

Pendapat Handoko et al. (2008) mengenai dampak sosio-ekonomi akibat perubahan iklim diantaranya yaitu :

- 1) Penurunan produksi dan produktivitas,

- 2) Penurunan pangsa GDP (Gross Domestik Bruto) sektor pertanian,
- 3) Fluktuasi harga produk pertanian di pasar dunia,
- 4) Perubahan distribusi geografis dari rezim perdagangan,
- 5) Peningkatan jumlah penduduk yang berisiko kelaparan dan ketidakamanan pangan Secara tidak langsung pengaruh perubahan iklim terhadap penurunan produksi pangan dunia, misalnya terjadi melalui peningkatan area dan produksi bio-fuel (konversi dari lahan pangan), yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pangan karena area yang dialokasikan ke bahan pangan mengalami penurunan. Variabilitas produktivitas sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, karena variabilitas hasil akan menyebabkan variabilitas supply (penawaran), maka perdagangan internasional sering digunakan sebagai alat untuk mengatasi variabilitas penawaran ini.

Dampak perubahan iklim terhadap perdagangan dipengaruhi oleh tiga faktor:

- 1) Total produksi pertanian di dalam negeri.
- 2) Keseimbangan antara produk yang diekspor dan yang dipasarkan di dalam negeri.
- 3) Struktur produksi pertanian itu sendiri. (Handoko et al. 2008)

## **5. Dampak Perubahan Iklim**

Fenomena perubahan iklim (*climate change*) sebenarnya sudah terjadi dan sementara tetap berlangsung saat ini sampai waktu-waktu mendatang. Pada prinsipnya perubahan iklim terjadi karena beberapa



unsur iklim intensitasnya menyimpang dari kondisi biasanya menuju ke arah tertentu. Berbagai penelitian ilmiah telah melaporkan bahwa karbondioksida (CO<sub>2</sub>) di lapisan atmosfer yang merupakan konsekuensi hasil sisa pembakaran dari batu bara, kayu hutan, minyak, dan gas, telah meningkat hampir mendekati angka 20% sejak dimulainya revolusi industri.

Murdiyarso (2001) menjelaskan bahwa kawasan perindustrian telah menghasilkan limbah GRK, seperti karbondioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan nitrousoksida (N<sub>2</sub>O) yang dapat menyebabkan terjadinya “efek selimut”. Efek inilah yang kemudian mengakibatkan naiknya suhu di permukaan bumi. Sebagai bahan perbandingan, konsentrasi GRK pada masa pra-industri di abad ke-19 baru sebesar 290 ppmv (CO<sub>2</sub>), 700 ppbv (CH<sub>4</sub>), dan 275 ppbv (N<sub>2</sub>O). Sedangkan pada saat ini, peningkatannya menjadi sebesar 360 ppmv (CO<sub>2</sub>), 1.745 ppbv (CH<sub>4</sub>), dan 311 ppbv (N<sub>2</sub>O). Dengan demikian, menurut para ahli, GRK untuk CO<sub>2</sub> pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai kisaran 550 ppm (Nurdin, 2011).

## **6. Adaptasi dan Mitigasi**

### **a. Adaptasi**

Daya adaptasi terhadap perubahan iklim adalah kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dari perubahan iklim (termasuk di dalamnya variabilitas iklim dan variabilitas ekstrem) dengan cara mengurangi kerusakan yang ditimbulkan, mengambil manfaat atau mengatasi perubahan dengan segala akibatnya. Menurut Murdiyarso

(2001), adaptasi terhadap perubahan iklim adalah salah satu cara penyesuaian yang dilakukan secara spontan maupun terencana untuk memberikan reaksi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan strategi yang diperlukan pada semua skala untuk meringankan usaha mitigasi dampak. Adaptasi terhadap perubahan iklim sangat potensial untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan dampak manfaat, sehingga tidak ada korban. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak strategi adaptasi dapat memberikan manfaat baik dalam penyelesaian jangka pendek dan maupun jangka panjang, namun masih ada keterbatasan dalam implementasi dan keefektifannya.

Hal ini disebabkan daya adaptasi yang berbeda-beda berdasarkan daerah, negara, maupun kelompok sosial-ekonomi. Negara dengan sumberdaya ekonomi terbatas, tingkat teknologi rendah, informasi dan keahlian rendah, infrastruktur buruk, institusi lemah, ketidakadilan kekuasaan, kapasitas sumber daya terbatas; adalah memiliki kemampuan adaptasi yang lemah dan rentan terhadap perubahan iklim. Berlaku hal yang sebaliknya bagi Negara dengan sumberdaya ekonomi tinggi, tingkat teknologi tinggi, informasi dan keahlian tinggi, infrastruktur baik, institusi kuat, berkeadilan dalam kekuasaan, kapasitas sumber daya melimpah.

### **1. Komponen Kegiatan Adaptasi dalam ProKlim**

Adapun komponen-komponen adaptasi dalam ProKlim menurut Albar, I., Aminah., Emilda, A., Haska, H., Sugiatmo., dan Tray, C. S.

(2017) dalam Road Map Program Kampung Iklim (PROKLIM). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, yaitu sebagai berikut:

**a) Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor**

1) Pemanenan air hujan

Pemanenan Air Hujan adalah upaya penanganan/antisipasi kekeringan antara lain dengan membangun cek dam, bendungan, embung, sumur renteng di daerah rentan kekeringan dan penampungan air hujan (PAH). Bentuk dan ukuran bangunan menyesuaikan kondisi dan kemampuan masyarakat setempat, dalam skala individu maupun komunal.

2) Peresapan air

Peresapan air adalah upaya penanganan/antisipasi kekeringan dengan meningkatkan resapan air misalnya melalui pembuatan biopori, sumur resapan, Bangunan Terjunan Air (BTA) atau rorak, dan Saluran Pengelolaan Air (SPA).

3) Perlindungan dan pengelolaan mata air

Perlindungan Mata Air adalah upaya penanganan/antisipasi kekeringan dengan melaksanakan perlindungan mata air, yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembuatan aturan, penjagaan, dan upacara adat.

4) Penghematan penggunaan air

Penghematan penggunaan air adalah upaya untuk menggunakan air secara efektif dan efisien sehingga tidak mengalami pemborosan,

termasuk upaya penggunaan kembali air yang sudah dipakai untuk keperluan tertentu.

5) Sarana dan prasarana pengendali banjir

Pembuatan instalasi yang dimaksud bertujuan untuk penanggulangan banjir, yaitu dengan upaya penanganan/ antisipasi bencana banjir dengan membangun instalasi penanggulangan banjir, seperti saluran drainase, kanal, kolam retensi, rumah pompa, dan pengerukan dan penyodetan.

6) Sistem peringatan dini (*early warning system*)

Sistem peringatan dini bertujuan untuk penanganan/ antisipasi bencana banjir dengan mengembangkan Sistem Peringatan Dini seperti informasi ketinggian muka air sungai, pemasangan alat tradisional, pemakaian alat komunikasi jarak jauh, rute evakuasi.

7) Rancang bangun yang adaptif

Konstruksi bangunan adalah bentuk kegiatan dalam penanganan/antisipasi bencana banjir, misalnya dengan meninggikan struktur bangunan, desain rumah panggung, atau rumah apung.

8) Terasering

Penanganan/antisipasi bencana longsor dan erosi dapat dilakukan dengan membuat terasering, yaitu bangunan berundak-undak yang tegak lurus arah lereng dan mengikuti garis horizontal. Penerapan terasering perlu mempertimbangkan karakteristik lahan, misalnya luas lahan, ketebalan tanah, dan kemiringan lereng.

#### 9) Penanaman *vegetasi*

Penanaman *vegetasi* adalah upaya penanganan/ antisipasi bencana longsor, erosi, dan penanganan lahan kritis, seperti dengan penanaman *vegetasi* jenis tertentu.

#### b) Peningkatan ketahanan pangan

##### 1) Sistem pola tanam

*Sistem* pola tanam adalah sebagai upaya penanganan/ antisipasi gagal tanam dan gagal panen, misalnya sistem tumpangsari dan lain-lainnya.

##### 2) Sistem irigasi/drainase

Sistem irigasi/drainase ini adalah sebagai upaya *penanganan/*antisipasi gagal tanam dan gagal panen, misalnya sistem irigasi hemat air (kondisi air macak macak, tidak tergenang), dll.

##### 3) Praktik pertanian terpadu (*integrated farming/mix farming*)

Penanganan/antisipasi gagal tanam dan gagal panen dengan *melakukan* praktik pertanian terpadu (*integrated farming/ mixfarming*), yaitu kombinasi budidaya tanaman semusim, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan; yang berada dalam satu lokasi dan terjadi interaksi antar komponen tersebut. Misalnya kotoran ternak digunakan untuk pupuk kandang, sisa seresah tanaman dijadikan kompos, dll.

##### 4) Pengelolaan potensi lokal

Upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tanaman dan *hewan* lokal untuk peningkatan ketahanan pangan, terutama

tanaman dan hewan lokal yang memiliki potensi untuk beradaptasi terhadap kondisi iklim ekstrim.

5) Penganekaragaman tanaman pangan

Penanganan/antisipasi gagal tanam dan gagal panen dengan *melakukan* penganekaragaman tanaman pangan. Apabila jenis tanaman yang ditanam makin banyak, maka jenis panen yang didapatkan makin bervariasi dan apabila ada salah satu atau dua jenis yang gagal panen, masih ada jenis tanaman lain yang dapat dipanen

6) Sistem dan teknologi pengelolaan lahan dan pemupukan

*Penanganan/antisipasi* gagal tanam dan gagal panen dengan menerapkan teknologi pengelolaan lahan, seperti:

- a) Tanam padi hemat air, misalnya dengan model irigasi berselang/bertahap (intermittent irrigation), dan tabela (seeded rice) di lahan irigasi.
- b) Penggunaan pupuk unsur hara mikro, misalnya unsur Si yang bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tanaman padi terhadap serangan hama penyakit dan tahan rebah akibat curah hujan ekstrim (sangat deras).
- c) Pengelolaan lahan tanpa bakar, yaitu upaya maksimal terhadap sisa panen berupa seresah yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik dan mulsa (penutup permukaan tanah).
- d) Teknologi minipadi, yaitu penggabungan antara budidaya tanaman padi dengan pemeliharaan ikan air tawar dalam satu lokasi. Teknologi ini membutuhkan ketepatan dalam pengelolaan air agar

sesuai untuk kehidupan ikan dan aktifitas budidaya tanaman lainnya (seperti pemberantasan hama penyakit) tidak mengganggu kehidupan ikan.

e) Precision farming, yaitu model pertanian yang mengutamakan presisi (ketepatan), seperti tepat waktu, tepat dosis pupuk, dan tepat komoditas.

f) Padi apung, yaitu tanaman padi yang ditanam pada media yang dapat mengapung di atas permukaan air untuk mengantisipasi bahaya banjir.

7) Teknologi pemuliaan tanaman dan hewan ternak

Mengaplikasikan teknologi pemuliaan tanaman seperti penyilangan spesies tanaman untuk menghasilkan varietas yang tahan perubahan iklim, seperti cuaca ekstrim (panas terik, kekeringan, dan hujan angin).

8) Pemanfaatan lahan pekarangan

Pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman bermanfaat, seperti mengembangkan apotek hidup dan lumbung hidup.

**c) Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, gelombang tinggi**

1) Struktur pelindung alamiah

Pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pantai dengan melakukan penanaman vegetasi pantai (misal: ketapang, cemara laut, mangrove, kelapa) dan perlindungan pesisir (misal: melindungi gumuk pasir, pengelolaan terumbu karang).

## 2) Struktur perlindungan buatan

Membuat konstruksi perlindungan pantai dan pesisir, misalnya membangun struktur pemecah ombak, tembok laut (sea wall), sabuk hijau (green belt), terumbu buatan dan pintu air pasang surut. c. Struktur konstruksi Modifikasi struktur bangunan dengan 25 bangunan melakukan misalnya peninggian ketinggian bangunan, rumah panggung, dan struktur terapung.

## 3) Relokasi permukiman

Melakukan relokasi pemukiman/bangunan dan aset penting lainnya menjauhi pantai sehingga dampak kenaikan muka air laut dapat dikurangi dan penaatan aturan batas sempadan pantai.

## 4) Penyediaan air bersih

Upaya penyediaan air bersih di daerah pesisir, seperti pengendalian pengambilan air tanah dan penampungan air hujan.

## 5) Sistem pengelolaan pesisir terpadu

Penerapan konsep pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu, contoh-nya pengintegrasian kegiatan wisata dengan budidaya pesisir (mina wisata).

## 6) Mata pencaharian *alternative*

Upaya masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian baru menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan, antara lain budidaya kepiting dan penggantian *spesies* ikan yang adaptif terhadap perubahan iklim.



#### **d) Pengendalian penyakit terkait iklim**

##### 1) Pengendalian vector penyakit

Upaya surveilans (pemantauan terus menerus) dan pengendalian vektor, misalnya dengan melaksanakan 3M (Menguras, Menimbun, Menutup) sarang nyamuk, pengendalian perindukan nyamuk dan tikus, modifikasi dan memperbaiki lingkungan (misalnya untuk mencegah adanya genangan air), memasukkan ikan dalam kolam atau pot tanaman, dan keberadaan tim Jumantik (Juru Pemantau Jentik) di daerah setempat.

##### 2) Sistem kewaspadaan dini terkait penyakit yang dipengaruhi perubahan iklim

Upaya masyarakat untuk mengetahui lebih dini mengenai kondisi penyakit terkait perubahan iklim, contohnya adalah penerapan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi terjadinya penyakit akibat perubahan iklim seperti diare, malaria, DBD.

##### 3) Sanitasi dan air bersih

Upaya peningkatan fasilitas sanitasi/air bersih, misalnya dengan memiliki rumah yang sehat, tersedia akses air bersih dan jamban.

##### 4) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Upaya sosialisasi dan pelebagaan PHBS, contohnya mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban sehat dan menggunakan air bersih.

## **b. Mitigasi**

Mitigasi adalah usaha menekan penyebab perubahan iklim, seperti gas rumah kaca dan lainnya agar resiko terjadinya perubahan iklim dapat diminimalisir atau dicegah. Upaya mitigasi dalam bidang energi di Indonesia, misalnya dapat dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dan konservasi energi, mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, seperti biofuels, energi matahari, energi angin dan energi panas bumi, efisiensi penggunaan energi minyak bumi melalui pengurangan subsidi dan mengoptimalkan energi pengganti minyak bumi, dan penggunaan energi Nuklir.

Contoh upaya mitigasi yang lain dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air antara lain; Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan penaburan material semai (seeding agent) berupa powder atau flare, usaha rehabilitasi waduk dan embung, alokasi air melalui operasi waduk pola kering, pembangunan jaringan irigasi, penghijauan lahan kritis dan sosialisasi gerakan hemat air, peningkatan kehandalan sumber air baku, peningkatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), pengembangan teknologi pengolahan air tepat guna, pembangunan dan rehabilitasi waduk dan embung serta pembangunan jaringan irigasi.

### **1. Komponen Kegiatan Mitigasi dalam ProKlim**

Adapun komponen-komponen adaptasi dalam ProKlim yaitu menurut Albar, I., Aminah., Emilda, A., Haska, H., Sugiatmo., dan Tray, C. S. (2017) dalam Road Map Program Kampung Iklim (PROKLIM).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, yaitu sebagai berikut:

**a) Pengelolaan sampah dan limbah padat**

1) Pewadahan dan pengumpulan

Upaya pencegahan dekomposisi (pembusukan) sampah yang tidak pada tempatnya baik di tingkat rumah tangga dan komunal, seperti dengan menyediakan tempat sampah yang layak, tidak membuang sampah ke sungai atau media lingkungan lain, melakukan kegiatan pemilahan, dan memiliki TPS.

2) Instalasi pengolahan

Upaya masyarakat untuk mengolah sampah di tingkat komunal, misalnya dengan melakukan pengomposan, tidak melakukan pembakaran sampah, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah.

3) Pemanfaatan

Upaya masyarakat untuk memanfaatkan limbah padat dan gas methane yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah, misalnya dengan melakukan 3R (Reduce, Reuse, and Recycle), pemanfaatan gas metan dari limbah organik sebagai sumber energi, dan pemanfaatan pupuk organik dari proses pengomposan.

4) Penerapan konsep zerowaste

Upaya masyarakat untuk mengolah limbah padat dari kegiatan rumah tangga sehingga tidak ada sampah yang dibuang ke lingkungan,

misalnya melalui pengurangan jumlah sampah, pengomposan tingkat rumah tangga, pembuatan biopori dan bank sampah.

**b) Pengolahan dan pemanfaatan limbah cair**

1) Domestik

Masyarakat telah memiliki sistem pengolahan limbah cair domestik di tingkat komunal yang dilengkapi dengan instalasi penangkap methane, contohnya tanki septik dilengkapi dengan instalasi penangkap methane, dan memanfaatkan gas methane sebagai sumber energi baru.

2) Industri rumah tangga

Telah memiliki sistem pengolahan limbah cair yang dilengkapi dengan instalasi penangkap methane dan industri rumah tangga telah memanfaatkan gas methane sebagai sumber energi baru, misalnya IPAL *anaerob* yang dilengkapi penangkap *methane*.

**c) Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energy**

1) Teknologi rendah emisi GRK

Penerapan teknologi rendah emisi GRK, misalnya penggunaan tungku hemat energi, kompor sekam padi, kompor berbahan bakar biji-bijian non-pangan, lampu biogas, dan briket sampah.

2) Energi baru terbarukan

Pemanfaatan energi baru terbarukan misalnya mikrohidro, kincir angin, sel surya, biogas, gelombang, dan biomasa.

### 3) Efisiensi energi

Melakukan kegiatan efisiensi energi, contohnya perilaku hemat listrik, penggunaan lampu hemat energi (non-pijar), dan pencahayaan alami.

#### **d) Budidaya pertanian**

##### 1) Pengurangan pupuk dan modifikasi sistem pengairan

Upaya masyarakat untuk mengurangi emisi GRK akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia, misalnya menggunakan pupuk organik, pengolahan biomasa menjadi pupuk, menerapkan sistem pengendalian hama terpadu untuk meminimalkan penggunaan pestisida kimia, dan pengendalian hama secara mekanis.

##### 2) Kegiatan pascapanen

Masyarakat telah melakukan kegiatan pertanian yang dapat mengurangi emisi GRK dengan menghindari pembakaran pascapanen, misalnya tidak membakar jerami di sawah dan menghindari proses pembusukan jerami akibat penggenangan di sawah.

#### **e) Peningkatan tutupan vegetasi**

##### 1) Penghijauan

Upaya meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan.

## 2) Praktik wanatani

Upaya meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan praktik wanatani, seperti pembibitan, pemilihan jenis tanaman, penanaman, pemeliharaan, dan sistem pemanenan hasil hutan.

### f) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

#### 1) Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Masyarakat sudah memiliki kelembagaan dan sistem untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

#### 2) Pengelolaan lahan gambut

3) Upaya masyarakat untuk mengelola lahan gambut secara lestari dengan menghindari pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan tata air lahan gambut.

## 7. Program Kampung Iklim (ProKlim)

### a. Pengertian Program kampung Iklim (ProKlim)

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi. Program Kampung Iklim menjadi wilayah yang masyarakatnya melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terukur, terstruktur dan berkesinambungan.

Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Instruksi Bupati No.3 Tahun 2017 Tentang pembinaan dan pendampingan bagi lokasi- lokasi yang akan diusul sebagai lokasi kampung iklim skala Desa/kelurahan, dusun/lingkungan dan skala rukun 18 warga (RW) yang mewakili kecamatan dengan lingkup kegiatan sebagai berikut :

- 1) Budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan tutupan vegetasi;
- 2) Pengelolaan dan pemanfaatan sampah/limbah;
- 3) Pengendalian penyakit terkait iklim;
- 4) Peningkatan ketahanan pangan dan urban farming ; dan
- 5) Peningkatan ketahanan energi serta penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

#### **b. Tujuan Khusus Program Kampung Iklim**

Program kampung iklim tidak hanya memiliki tujuan umum namun juga memiliki tujuan khusus. Tujuan Khusus Program Kampung Iklim adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal.
- 2) Memberikan pengakuan terhadap aksi lokal yang telah dilakukan masyarakat untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 3) Mendorong penyebaran kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain.

**c. Manfaat Program Kampung Iklim meliputi:**

- 1) Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim;
- 2) Terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.
- 3) Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim;
- 4) Tersosialisasinya kesadaran dan gaya hidup rendah karbon;
- 5) Meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi terkait perubahan iklim.



## B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.2.

**Tabel 1**  
**Penelitian yang Relevan**

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faedlulloh., dkk. (2019)	Program Unggulan Kampung Iklim (Proklim) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim yang dilaksanakan di Kelurahan Kebon Kosong dan Kelurahan Jati berjalan dengan baik. Dimana dalam aktivitas adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan di Kelurahan Kebong Kosong dan Kelurahan Jati sama-sama menekankan pentingnya proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. masyarakat di kelurahan tersebut akhirnya 7 lebih

				berdaya dalam menghadapi perubahan iklim.
2.	Puspito, Ahmad Ilham.(2016)	Implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan program kampung iklim tingkat provinsi tergolong baik sesuai dengan komponen program kampung iklim. Kelurahan Plalangan sudah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan lingkungan. Keberhasilan program Kampung Iklim tingkat provinsi di Kelurahan Plalangan didukung dengan masyarakat yang berperan serta secara aktif didalam pelaksanaannya .
3.	Rinaldy, R., dkk (2017)	Proses Community Development Pada Program Kampung Iklim Di Desa Cupang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukan proses community development pada 7 tahapan 8 Iklim Di Desa Cupang

		<p>Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim)</p>		<p>Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim) yang dilakukan hanya ada 5 tahapan yang sudah berjalan sebagaimana mestinya, yaitu tahapan engagement, assessment, perencanaan program, Implementasi, dan terminasi. Adapun tahapan evaluasi belum dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan kendala pada pemasaran produk dan manajemen organisasi terutama terhadap sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan.</p>
4.	Ali Akbar Wahab (2015)	Strategi Pelaksanaan Program	Pada penelitian ini digunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan adaptasi dan

		<p>Kampung Iklim (Proklamasi) di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>pendekatan Kualitatif. Dimana penulis menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan dan analisis bahanbahan tertulis sebagai sumber data utama.</p>	<p>mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mangempang dalam mendukung Proklamasi yaitu pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, serta peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim. Kegiatan lain yang dilakukan masyarakat adalah pengelolaan sampah dan limbah padat, penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi, budidaya pertanian, peningkatan tutupan vegetasi, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.</p>
5.	Rosnaeni (2020)	<p>Implementasi Program Unggulan Kampung Iklim di Kabupaten Bulukumba</p>	<p>Pada penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif. Dimana penulis menggunakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Unggulan Kampung Iklim pada 1). Adaptasi yaitu: a. Pada lahan masyarakat terdapat sumur resapan dan</p>

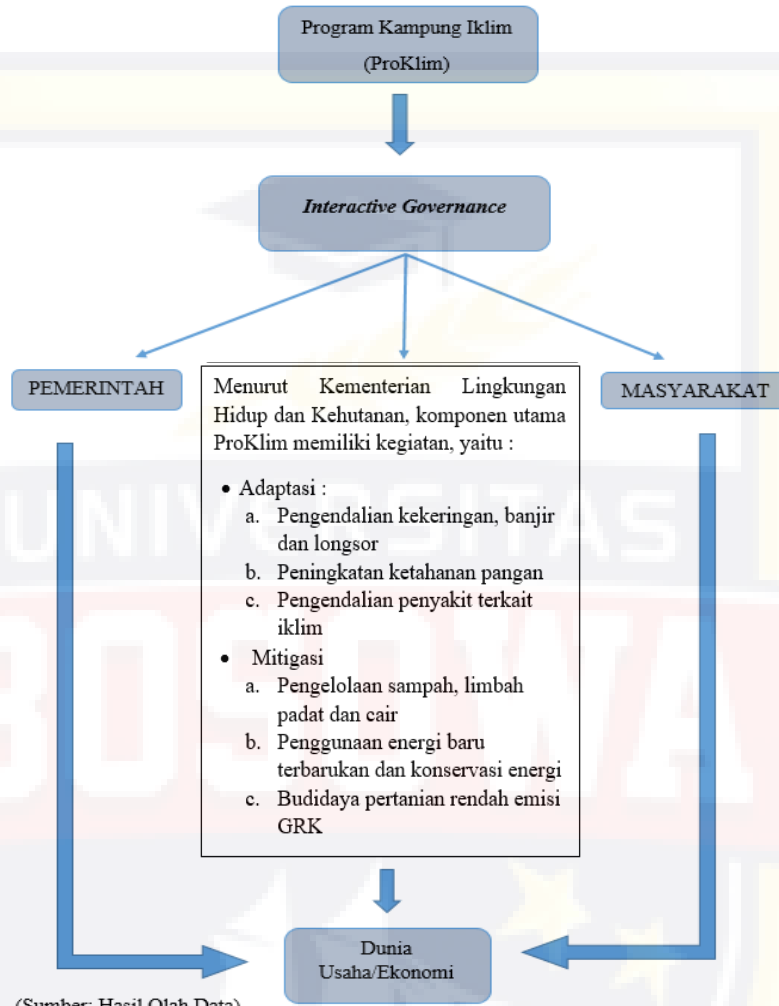
			wawancara dan observasi langsung ke lapangan	empang untuk menampung air. b. Petani memakai sistem irigasi ke sawah. c. Sampah organik dan non organik di buang di Bank Sampah.. 2) Mitigasi yaitu: a. Membuat Bank Sampah untuk mengolah sampah menjadi kerajinan dan pupuk. b. Menambah tutupan vetegasi/penanaman pohon untuk membuat tanah makin subur dan membuat desa makin hijau.
--	--	--	--	--

(Sumber : Hasil olah data)

### C. Kerangka Konseptual Penelitian

Program Kampung Iklim menjadi program pemerintah dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim melalui pelaksanaan ProKlim dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program berlingkup nasional yang dikembangkan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar dalam konsep *Interactive Governance*. Kerangka pemikiran ini dapat diperjelas dalam skema berikut ini :

**Gambar 1**  
**Model Kerangka Konsep**



(Sumber: Hasil Olah Data)

Penelitian ini mengenai proklamasi yang didasarkan dari sudut pandang oleh *interactive governance* yang berkaitan dengan interaksi pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program berlingkup nasional yang dikembangkan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar dalam konsep *Interactive Governance*. Bentuk komponen kegiatan dari proklamasi itu sendiri yaitu pertama adaptasi dimana memiliki kegiatan menurut Albar, I., Aminah., Emilda, A., Haska, H., Sugiatmo., dan Tray, C. S. (2017) dalam Road Map Program Kampung Iklim (PROKLIM). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, yaitu:

- a. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
- b. Peningkatan ketahanan pangan;
- c. Penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut; dan
- d. Pengendalian penyakit terkait iklim.

Yang kedua mitigasi memiliki kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair;
- b. Penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- c. Budidaya pertanian rendah emisi GRK;
- d. Peningkatan tutupan vegetasi; dan
- e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Sehingga kedua komponen tersebut berpengaruh pada dunia usaha atau ekonomi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual, dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan data, menjelaskan dan melakukan analisa secara obyektif dalam arti hasil penelitian ini akan lebih menekankan pada gambaran mengenai obyek penelitian yang sebenarnya.

Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menyusun gambaran mengenai obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, lalu data tersebut diolah dan diartikan untuk kemudian dapat melakukan analisa dan interpretasi dari data yang telah disajikan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang akan di teliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh informan. Masalah yang akan diteliti terkait *Interactive Governance* dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kota Makassar.



Lokasi yang dijadikan objek penelitian beralamat di Jalan Urip Sumohardjo No. 269 Gedung H & J Lantai 3 Kantor Gubernur SULSEL, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk tulisan yang berupa gambaran umum perusahaan atau instansi, maupun informasi langsung yang menyangkut kebijakan perusahaan atau instansi.

Sumber data dalam penulisan ini adalah:

1. Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini adalah data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang atau perusahaan yang terlibat langsung dalam penelitian dan berperan sebagai pemberi informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

1. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ir. Andi Hasbi,M.T.P)
2. Kepala bidang Tata Lingkungan (H. Muh. Fajar, S.T.,M.Si)
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Krusakan Lingkungan (Hj. Rafidah Nur, S.H.,)
4. Para Staf Subdin Bina Program
5. Para pelaku masyarakat yang menjadi binaan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono, (2011) beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik data yang dilakukan dengan cara yang ingin diteliti atau melalui percobaan (*eksperimen*). Cara efektif jika ingin menggunakan metode observasi adalah dengan melengkapinya dengan pengamatan dalam bentuk *checklist* sebagai terhadap masalah yang diteliti.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan informasi-informasi lain dibutuhkan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang akan diamati adalah kegiatan atau aktivitas yang berlangsung pada saat proses produksi.

## **2. Wawancara**

Mengadakan wawancara secara langsung kepada kepala bagian mengenai data yang diperlukan dalam penelitian berkaitan dengan informasi biaya produksi. Peneliti memberikan pemahaman secara jelas berkaitan dengan pertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Kemudian peneliti mengkonfirmasi ulang jawaban yang telah disampaikan informan. Hasil wawancara selanjutnya dicatat sebagai data penelitian. Pada penelitian kali ini, wawancara dilakukan dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar.

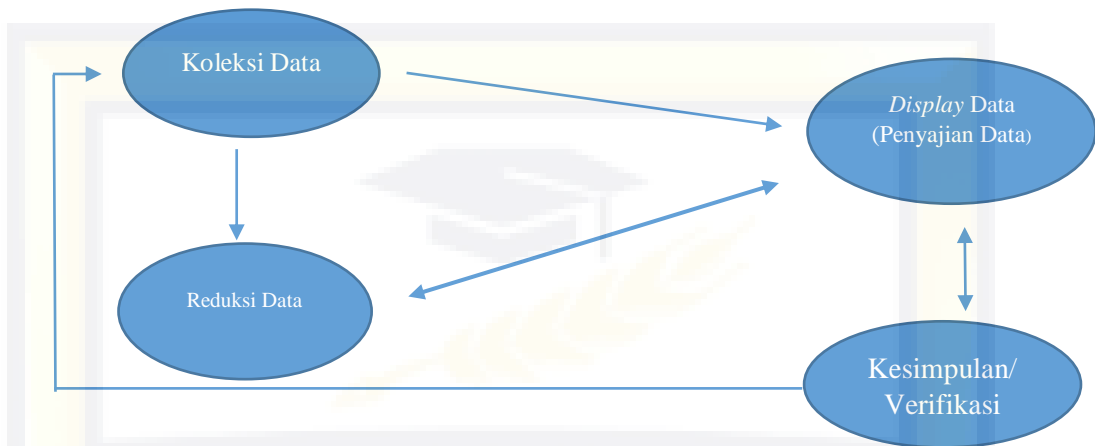
## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan kegiatan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **F. Metode Analisis Data**

Berdasarkan masalah pokok dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka metode analisis yang digunakan yaitu analisa deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti sehingga menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Skema metode analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut;

**Gambar 2**  
**Skema Metode Analisis Data**



(Sumber : Sugiyono, 2011:247)

Berikut penjelasan gambar di tersebut :

1. Koleksi data, mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar..
2. Reduksi data, Mereduksi data adalah proses mempertegas, memperpendek, menyeleksi, membuat fokus, membuang yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.
3. *Display Data*, Merupakan kegiatan pengorganisasian data, agar tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
4. Kesimpulan/Verifikasi, Dalam awal pencarian data, peneliti harus sudah mengerti apa arti hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi- konfigurasi yang

mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi. Berbagai hal tersebut dipegang oleh peneliti tidak secara kuat, artinya tetap bersikap terbuka, yang awalnya kurang jelas, kemudian semakin meningkat secara eksplisit hingga memiliki landasan yang kuat.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tempat Meneliti

##### 1. Geografis dan Demografis Kota Makassar

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat  $119^{\circ}, 18', 27', 97''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}, 8', 6', 19''$  Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 175,77 km<sup>2</sup> yang meliputi 14 kecamatan. Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki - laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.

Luas wilayah kecamatan :1 Tamalanrea : 31,84 km<sup>2</sup>; 2 Biringkanaya 48,22 km<sup>2</sup>; 3 Manggala 24,14 km<sup>2</sup>; 4 Panakkukang 17,05 km<sup>2</sup>; 5 Tallo 5,83 km<sup>2</sup>; 6 Ujung Tanah 5,94 km<sup>2</sup>; 7 Bontoala 2,10 km<sup>2</sup>; 8 Wajo 1,99 km<sup>2</sup>; 9 Ujung Pandang 2, 63 km<sup>2</sup>; 10 Makassar 2,52 km<sup>2</sup>; 11 Rappocini 9,23 km<sup>2</sup>; 12 Tamalate 20,21 km<sup>2</sup>; 13 Mamajang 2,25 km<sup>2</sup>; 14 Mariso 1,82 km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk 6.646,5/km<sup>2</sup> dan Jumlah penduduk sebanyak 1,168,258 jiwa. (Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan)

## **2. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan**

### **a. Sejarah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan**

Awal terbentuknya Organisasi Lingkungan Hidup dibentuk dengan Nomenklatur Biro Lingkungan, kemudian pada Tahun 1998 terjadi perubahan Nomenklatur baru menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dirubah kembali dengan nama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sampai tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 berubah menjadi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

**b. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan**

**1) Visi**

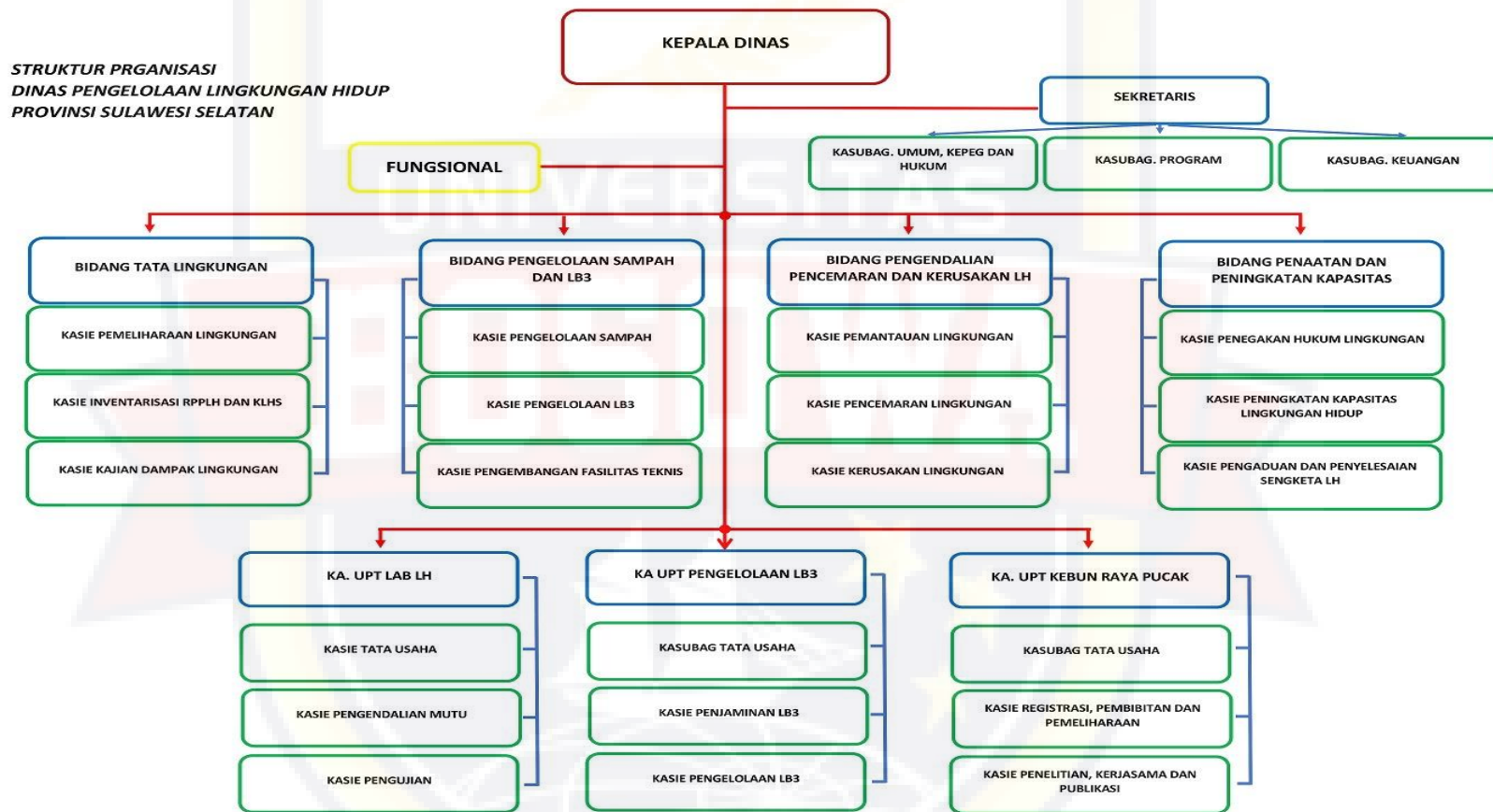
- a) Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

**2) Misi**

- a) Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;
- b) Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- c) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d) Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.



c. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan



(Sumber : Hasil wawancara)

**d. Uraian tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Sulawesi Selatan**

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian pada susunan organisasi DPLH SulSel adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
  - a) Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e) Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - f) Mengoordinasikan dan menyelenggaraan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

## 2) Sekretaris Dinas

- a) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- e) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana.

## 3) Kepala Sub Bagian Program

- a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

- a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g) Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar.

5) Kepala Sub Bagian Keuangan

- a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai.

6) Kepala Bidang Tata Lingkungan

- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tata Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

e) Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis.

8) Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kajian Dampak Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis kajian dampak lingkungan.

9) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f) Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pemeliharaan lingkungan hidup.

10) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f) Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun meliputi pengelolaan.

#### 11) Kepala Seksi Pengelolaan Sampah

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e) Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pengelolaan sampah.

#### **B. Hasil Penelitian**

Munculnya pemerintahan interaktif dalam menyikapi perubahan iklim tampaknya telah menghasilkan sejumlah perubahan *irreversible*. Salah satunya yaitu harapan individu dan pemangku kepentingan yang terorganisir secara kolektif dalam menyudutkan program kampung iklim (Proklim) sebagai langkah awal menciptakan kampung yang terorganisir, dijelaskan bahwa kampung iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga (RW) atau dusun yang paling tinggi setingkat kelurahan atau desa dan wilayah masyarakatnya yang telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017:9).



**Tabel 2**  
**Proklamasi Utama Kota Makassar**

No.	Lokasi	Jumlah Lokasi	Pelaksanaan	Pendamping
1.	RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea	1	18 – 21 Juli 2022	Muh. Fajar, ST., M.Si Andi Ridawati Sunre
2.	RW 11 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang	1	18 – 21 Juli 2022	Muh. Fajar, ST., M.Si Andi Ridawati Sunre
3.	RW 05 Kel. Barombong Kc. Tamalate	1	18 – 21 Juli 2022	Muh. Fajar, ST., M.Si Andi Ridawati Sunre

**1. Bentuk *Interactive Governance* dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di kota makassar (Menurut Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. Eds, 2016)**

Bentuk pemerintahan interaktif atau *Interactive Governance* adalah hasil dari strategi dan keputusan *ad hoc* di pihak pembuat keputusan publik yang menyadari bahwa ruang lingkup tindakan sepihak semakin mengecil dan merespon tekanan dari pihak swasta yang semakin berkompeten dan menuntut pihak-pihak yang ingin berperan aktif bagian dalam pengambilan keputusan publik. Bentuk *Interactive Governance* terdiri dari:

**a. Pemerintah**

Peran DPLH Sulsel merumuskan *Interactive Governance* melalui penguatan kelembagaan dalam bentuk Surat Keputusan terkait ProKlim yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian Walikota Makassar menjadi tembusan. Interaktif berarti ada aktivitas sinergitas pemerintahan. Dalam keterlibatan pemerintah dalam Proklamasi sangat berpengaruh karena adanya bantuan tersebut berupa bantuan moril dan materil. Berikut kutipan wawancara

yang peneliti lakukan bersama Bapak Sulman selaku sekretaris dinas, terkait siapa saja yang dilibatkan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel dalam Program Kampung Iklim.

“DPLH Sulsel sebagai koordinator ProKlim di tingkat Provinsi melibatkan para pemangku kebijakan dalam pelaksanaannya di tingkat Kabupaten atau Kota dalam hal ini adalah para Kepala Daerah, Kepala OPD dan Masyarakat yang menjadi wilayah atau lokus ProKlim”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 September 2022 pukul 12.01 WITA)

Pelaksanaan program kampung iklim tidak lepas dari tinjauan pihak berwenang dalam lokus tersebut, program ini didasari atas persetujuan dari berbagai pihak atau pemangku kebijakan yaitu kepala daerah, kepala OPD dan yang paling berperang penting dalam penelitian ini adalah masyarakat.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Muh. Fajar selaku pihak kepala sub bagian program menyangkut DPLH yang melibatkan perangkat pemerintah dan masyarakat tersebut.

“Dalam menjalankan dan menyukseskan ProKlim, DPLH Sulsel wajib melibatkan Pemerintah sebagai pendukung kegiatan dalam bentuk kebijakan dan anggaran, selanjutnya masyarakat yang terlibat yang menjalankan kegiatan ProKlim di lokusnya masing-masing”. (Hasil wawancara pada tanggal 23 September 2022 Pukul 12.30 WITA)

Peneliti memahami bahwa Keterlibatan pemerintah dalam program ini tidak hanya menyukseskan program yang dijalankan tetapi juga dapat membantu

pemeliharaan desa atau kampung tersebut, dengan adanya program ini masyarakat disekitar sangat menguntungkan bagi mereka dan juga lingkungannya.

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa dalam lokasi yang menjadi fokus kegiatan ProKlim di Kota Makassar untuk tahun 2022 adalah :

1. RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
2. RW 11 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang
3. RW 05 Kel. Barombong Kec. Tamalate

Setelah melihat dari hasil observasi peneliti temukan, peneliti melanjutkan pertanyaan kepada bapak Sulman selaku sekretaris dinas, tentang mengapa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel Melibatkan Perangkat Pemerintah dan Masyarakat Tersebut.

“Dalam menjalankan dan menyukseskan ProKlim, DPLH Sulsel wajib melibatkan Pemerintah sebagai pendukung kegiatan dalam bentuk kebijakan dan anggaran, selanjutnya masyarakat yang terlibat yang menjalankan kegiatan ProKlim di lokusnya masing-masing”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 September 2022 pukul 12.01 WITA)

Dari hasil wawancara di atas peneliti memahami bahwa Dengan adanya program kampung iklim atau disingkat dengan Proklm antusias masyarakat sangat terlihat karena tidak hanya bantuan berupa moril tetapi juga berupa materil atau anggaran yang dikeluarkan oleh perangkat pemerintah yang sangat membantu masyarakat.

Dari hasil wawancara dan analisis diatas menyangkut pemerintah, peneliti menyimpulkan bahwa perangkat pemerintah sangatlah penting dalam kesejahteraan masyarakat, dengan adanya Proklim masyarakat sangat menguntungkan baik dari hasil lingkungan maupun masyarakat itu sendiri.

#### **b. Proklim dalam Adaptasi**

Selain masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan ProKlim ini, Program Kampung Iklim ini juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi pemanasan global yang sedang terjadi di dunia saat ini khususnya Indonesia, yang mana salah satu bentuk adaptasinya adalah bagaimana masyarakat bisa dan terbiasa untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.

Dalam sesi wawancara yang dilanjutkan oleh peneliti mengenai proklim semakin mendalam karena menyangkut dengan lingkungan dalam indikator adaptasi, peneliti bertanya kepada bapak sulman selaku sekretasi dinas tentang yang terlibat dalam pelaksanaan program ini kecuali masyarakat. Dalam pernyataannya beliau menjawab:

“Dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, ProKlim melibatkan berbagai sektor atau pihak yang mana DPLH Sulsel adalah *leading sector*. Adapun pihak yang terlibat adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Bappelitbangda Sulsel, Dinas Kehutanan Sulsel, Dinas Pertanian Sulsel, Dinas Perhubungan. Dengan di jalankan program ini sebagai bentuk kegiatan nyata yang dilakukan masyarakat dalam membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang sangat

berdampak pada pemanasan global di bumi.” (Hasil Wawancara pada tanggal 20 September 2022 pukul 12.01 WITA

Pelaksanaan yang dilakukan Proklam yaitu di wilayah lokasi yang telah diusulkan dan telah memenuhi syarat dari Tim ProKlim Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam menjalankan ProKlim, Pemerintah Daerah wajib berkolaborasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, dimulai dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang kemudian DPLH Sulsel berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau kota masing-masing. Melalui pelaksanaan tersebut maka dampak yang dihasilkan adalah nyata dan dapat terasa setelah ProKlim ini berhasil dilaksanakan di tiap wilayah masing-masing yang telah melaksanakan ProKlim.

### **c. Proklam dalam Mitigasi**

Selain adaptasi, kegiatan mitigasi merupakan kegiatan utama dalam ProKlim ini, kegiatan ProKlim diharapkan dapat terus berkesinambungan dan berjalan setelah lolos terverifikasi oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan ProKlim ini memiliki target Nasional sebanyak 20.000 Kampung Iklim di Indonesia pada tahun 2024 termasuk wilayah kota makassar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menelusuri kegiatan mitigasi, dan memberikan pertanyaan kepada narasumber pelaksanaan program tentang komponen dari mitigasi memberikan dampak yang baik dalam hubungan

lingkungan terhadap iklim, bapak Muh Fajar selaku kepala sub bidang program menjawab mengemukakan jawaban tersebut

“Semua pihak yang tergabung dalam Tim Kelompok Kerja ProKlim masing-masing wilayah wajib berperan serta aktif dalam mendukung kegiatan atau upaya-upaya mitigasi. Komponen mitigasi tidak dapat dipisahkan dari ProKlim, karena kegiatan mitigasi merupakan unsur utama dalam ProKlim setelah kegiatan adaptasi. Bentuk kegiatan mitigasi itu merupakan upaya atau kegiatan-kegiatan langsung dalam membantu pengurangan emisi atau penyerapan karbon dalam efek gas rumah kaca. Sehingga hubungan mitigasi terhadap lingkungan sangat berperan penting bagi iklim”. (Hasil wawancara pada tanggal 23 September 2022 Pukul 12.30 WITA)

Bentuk mitigasi yang dapat mengurangi resiko bencana dari kegiatan ProKlim ini salah satu diantaranya adalah masyarakat di lokasi ProKlim melakukan kegiatan penanaman kembali pohon di wilayah pegunungan yang telah gundul dan wilayah sekitar aliran sungai. Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota dapat melakukan pemanfaatan sumber daya air yang ada di wilayah lokus ProKlim melalui program-program yang mendukung kegiatan pertanian.

Pemerintah dapat mengurangi resiko dari perubahan iklim dan mempunyai strategi khusus dalam menyikapinya. Strategi tersebut yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi resiko dari perubahan iklim dengan memberikan dukungan penuh kepada pihak-pihak yang mau dan terlibat dalam menyelesaikan kegiatan ProKlim ini.

**2. Partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (Bryan A. Garner, 2004, dalam *Black's Law Dictionaty Eight Edition, West Publishing Co., United States of America, hlm. 1425*)**

Selain melihat dari sudut pandang *Interactive Governance* atau interaksi pemerintah juga besar kaitannya dengan aktivitas manusia atau masyarakat, dimana kaitannya tersebut berdampak melalui perubahan iklim yang merupakan berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia atau berhubungan dengan masyarakat sekitar yang melaksanakan program kampung iklim.

Menurut Bryan A. Garner, 2004, dalam *Black's Law Dictionaty Eight Edition, West Publishing Co., United States of America, hlm. 1425*, Masyarakat (*Society*) is “a community of people, as of a state, nation, or locality, with common cultures, traditions, and interests.

Dalam observasi yang dilakukan peneliti dan turun langsung kedalam lapangan, peneliti melakukan wawancara bersama kepada bapak Muh Fajar yang selaku kepala sub bidang program tentang apa syarat untuk menjadi Kampung Iklim dalam ProKlim. Dalam wawancaranya narasumber menjawab,

“Syarat dalam program kampung iklim yaitu dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa”.

Adapun ketentuannya harus melalui beberapa tahapan seperti :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi lokasi kampung iklim yang akan diusulkan untuk mengikuti Program Kampung Iklim.
2. Melakukan pra penilaian ProKlim untuk mengetahui lokasi yang memiliki nilai awal yang tinggi dan kemudian dapat diusulkan dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN).
3. Mendampingi Tim Sekretariat Pusat ProKlim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam proses verifikasi lokasi yang lolos dalam tahapan verifikasi". (Hasil Wawancara Pada tanggal 23 Sptember 2022 pukul 12.30 WITA)

Pembina masyarakat dalam ProKlim adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota setempat yang melaksanakan ProKlim. Mengikuti kebijakan atau program yang dijalankan oleh DPLH Sulsel adalah wajib, karena DPLH Sulsel merupakan koordinator dari semua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan ProKlim diadakan setiap 3 kali dalam 1 tahun berjalan dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat menyimpulkan bahwa manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya ProKlim ini adalah selain membantu menyukseskan program Pemerintah Pusat yang melalui DPLH Sulsel adalah terbentuknya pola hidup atau kebiasaan untuk bertahan hidup dengan adanya perubahan iklim yang saat ini terjadi, yang mana



sangat berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing akibat dari pemanasan global dewasa ini.

### C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk *interactive governance* dan partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar.

#### 1. Bentuk *Interactive Governance* dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di kota makassar (Menurut Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. Eds, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan hasil analisa yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi pemanasan global. Pembina masyarakat dalam ProKlim adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota setempat yang melaksanakan ProKlim. Mengikuti kebijakan atau program yang dijalankan oleh DPLH Sulsel adalah wajib, karena DPLH Sulsel merupakan koordinator dari semua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan yang dilakukan Proklm yaitu di wilayah lokasi yang telah diusulkan dan telah memenuhi syarat dari Tim ProKlim Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam menjalankan ProKlim, Pemerintah Daerah wajib berkolaborasi atau bekerjasama dengan

berbagai pihak terkait, dimulai dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang kemudian DPLH Sulsel berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau kota masing-masing. Melalui pelaksanaan tersebut maka dampak yang dihasilkan adalah nyata dan dapat terasa setelah ProKlim ini berhasil dilaksanakan di tiap wilayah masing-masing yang telah melaksanakan ProKlim.

Pemerintah dapat mengurangi resiko dari perubahan iklim dan mempunyai strategi khusus dalam menyikapinya. Strategi tersebut yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi resiko dari perubahan iklim dengan memberikan dukungan penuh kepada pihak-pihak yang mau dan terlibat dalam menyukseskan kegiatan ProKlim ini.

Pelaksanaan kegiatan ProKlim diadakan setiap 1 kali dalam 1 tahun berjalan dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditangani oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

Urgensi dalam Pelaksanaan Proklm di Kota Makassar Secara keseluruhan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan indikator pelaksanaan Proklm. Namun, DPLH SULSEL tidak melakukan kegiatan dalam upaya penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut, rob, intrusi air laut, abrasi maupun gelombang tinggi dikarenakan kondisi dan tipologi wilayah tersebut termasuk daerah tinggi. Pelaksanaan Proklm di sesuai dengan tipologi masing-masing lokasi kampung iklim sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan Proklm menyesuaikan kondisi wilayahnya.

Selain adaptasi, kegiatan mitigasi merupakan kegiatan utama dalam ProKlim ini. Bentuk mitigasi yang dapat mengurangi resiko bencana dari kegiatan ProKlim ini salah satu diantaranya adalah masyarakat di lokasi ProKlim melakukan kegiatan penanaman kembali pohon di wilayah pegunungan yang telah gundul dan wilayah sekitar aliran sungai. Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota dapat melakukan pemanfaatan sumber daya air yang ada di wilayah lokus ProKlim melalui program-program yang mendukung kegiatan pertanian.

Dalam upaya pelaksanaan Proklam di suatu lokasi, pemerintah melalui Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Makassar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Proklam. Pelaksanaan sosialisasi ini juga disebut dengan *Interactive Governance* yang dilakukan setiap awal tahun menjelang pelaksanaan Proklam akan dimulai. Biasanya, sosialisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak kepentingan seperti perwakilan Kecamatan atau Kelurahan yang akan mengikuti pelaksanaan Proklam, terutama bagi lokasi yang telah melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kampung iklim yang akan mengikuti Proklam, biasanya merupakan usulan dari pihak kecamatan setempat untuk mewakili sebagai lokasi yang melaksanakan kegiatan Proklam. Kegiatan ini juga harus mengikuti kebijakan yang dijelaskan oleh Bapak Muh. Fajar selaku kepala sub bagian program mengemukakan bahwa:

“Mengikuti kebijakan atau program yang dijalankan oleh DPLH Sulsel adalah wajib, karna DPLH Sulsel merupakan koordinator dari semua Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pelaksanaan kegiatan ProKlim diadakan setiap 1 kali dalam 1 tahun berjalan dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.”. (Hasil Wawancara Pada tanggal 23 September 2022 pukul 12.30 WITA)

Berdasarkan wawancara di atas, Bapak Muh Fajar menjelaskan bahwa pelaksanaan Proklm dilakukan di setiap tahun 1 kali dan kebijakan dari DPLH Bersifat wajib, yang baik dilaksanakan tingkat kota maupun nasional. Namun, kegiatan yang dilakukan dapat di sesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan Proklm di masing-masing kota atau kabupaten atau Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian tujuan diadakannya sosialisasi dapat memberikan informasi penting mengenai pelaksanaan Proklm dan komponen kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan. Selain itu, kegiatan sosialisasi diharapkan dapat dilaksanakan juga oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan oleh DLH kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Proklm di Kota Makassar.

**2. Partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (Bryan A. Garner, 2004, dalam *Black's Law Dictionary Eight Edition, West Publishing Co., United States of America, hlm. 1425*)**

Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat akan

menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang dipedesaan maupun perkotaan.

Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak. Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan nasional kita. Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan. Dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturan-aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pun telah disusun secara terstruktur oleh pemerintah dalam Peraturan Jendral Pengendalian Perubahan Iklim nomor. P.1/PPI/SET/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Masyarakat dapat melakukan penambahan kegiatan, sejauh kegiatan tersebut dapat menanggulangi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Bahkan, tidak semua kegiatan harus ada dan dilaksanakan oleh satu lokasi, akan tetapi kegiatan yang dilakukan telah mencakup upaya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim dan sudah dapat memberikan perubahan dalam mengatasi bahaya perubahan iklim. Selain itu, Suatu kampung iklim juga mengupayakan kelembagaan yang baik sehingga

memicu munculnya dukungan yang menjamin keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi disuatu lokasi.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan memahami bahwa dengan adanya program kampung iklim atau disingkat dengan Proklim antusias masyarakat sangat terlihat karena tidak hanya bantuan berupa moril tetapi juga berupa materil atau anggaran yang dikeluarkan oleh perangkat pemerintah yang sangat membantu masyarakat.

Dari hasil wawancara dan analisis diatas menyangkut pemerintah, peneliti menyimpulkan bahwa perangkat pemerintah sangatlah penting dalam kesejahteraan masyarakat, dengan adanya Proklim masyarakat sangat menguntungkan baik dari hasil lingkungan maupun masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan Proklim dapat membawa tiga manfaat penting yaitu manfaat ekonomi, manfaat lingkungan dan manfaat dalam pengurangan dampak kejadian iklim ektrim. Pelaksanaan Proklim dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memunculkan sumber-sumber air baru, kesuburan tanah meningkat, penyelamatan dari gagal panen, peningkatan tanaman penutup tanah (cover crop), pengurangan dampak bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, banjir maupun rob serta pengurangan biaya pengeluaran rumah tangga.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat menyimpulkan bahwa manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya ProKlim ini adalah selain membantu menyukseskan program Pemerintah Pusat yang melalui DPLH Sulsel adalah terbentuknya pola hidup atau kebiasaan untuk bertahan hidup dengan adanya perubahan iklim yang saat ini terjadi, yang mana

sangat berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing akibat dari pemanasan global dewasa ini.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan merupakan hal penting sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa partisipasi dari masyarakat, suatu kegiatan tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Selain itu, dengan berpartisipasi, masyarakat dapat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sekitarnya. Sehingga seluruh pihak dapat melaksanakan aksi nyata guna meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim dan pelaksanaan Proklamasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Masyarakat yang berpartisipasi dalam Proklamasi juga telah memahami adaptasi dan mitigasi. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan hampir seluruh masyarakat sudah memahami program kampung iklim. Maka tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Proklamasi diterapkan di Kota Makassar yakni di RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea, RW 11 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang dan RW 05 Kel. Barombong Kec. Tamalate termasuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat juga telah menjalankan kegiatan Proklamasi secara terus menerus terutama dalam hal pengelolaan gas rumah kaca. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Proklamasi terutama pengelolaan sampah berada dalam kategori sangat baik. Sehingga sikap masyarakat tentang Proklamasi pun sangat baik. Mengacu pada Sugiyono (2007), maka sikap masyarakat tentang Proklamasi adalah sangat baik.

Masyarakat juga senantiasa melakukan kegiatan Proklamasi secara terus-menerus. Setiap warga telah melakukan pengelolaan yang sangat berdampak pada pemanasan global di bumi. Diharapkan kegiatan Proklamasi ini dapat terus dikembangkan karena program ini bertujuan untuk mengatasi atau mencegah agar perubahan iklim dapat berubah secara ekstrim dengan menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kota Makassar di jalankan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar yang merupakan usulan baru program ini dalam konsep *interactive governance* menarik untuk dicermati atau diteliti untuk melihat pola interaksi pemerintah dengan *stakeholders* dalam menyusun atau menjalankan program ini.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan bentuk interactive governance DPLH merumuskan Interactive Governance melalui penguatan kelembagaan dalam bentuk Surat Keputusan terkait ProKlim yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian Walikota Makassar menjadi tembusan. Pelaksanaan proklim yang di laksanakan di 3 lokasi yaitu RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea, RW 11 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang dan RW 05 Kel. Barombong Kec. Tamalate. Dimana dalam menjalankan ProKlim, Pemerintah Daerah wajib berkolaborasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Bentuk dari interactive governance ialah adaptasi, dijalankannya ProKlim karena merupakan bentuk kegiatan nyata yang dilakukan masyarakat dalam membantu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang sangat berdampak pada pemanasan global. Selain bentuk adaptasi, Bentuk mitigasi yang dapat mengurangi resiko bencana dari kegiatan ProKlim ini salah satu diantaranya adalah masyarakat di lokasi ProKlim melakukan kegiatan penanaman kembali pohon di wilayah pegunungan yang telah gundul dan wilayah sekitar aliran sungai.
2. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat juga telah menjalankan kegiatan Proklim secara terus menerus terutama dalam hal pengelolaan gas rumah kaca.

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Proklam terutama pengelolaan sampah berada dalam kategori sangat baik. Sehingga sikap masyarakat tentang Proklam pun sangat baik.

3. Masyarakat juga senantiasa melakukan kegiatan Proklam secara terus menerus. Setiap warga telah melakukan pengelolaan yang sangat berdampak pada pemanasan global di bumi. Diharapkan kegiatan Proklam ini dapat terus dikembangkan karena program ini bertujuan untuk mengatasi atau mencegah agar perubahan iklim dapat berubah secara ekstrim dengan menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kota Makassar di jalankan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar yang merupakan usulan baru program ini dalam konsep *interactive governance* menarik untuk dicermati atau diteliti untuk melihat pola interaksi pemerintah dengan stakeholders dalam menyusun atau menjalankan program ini. Berdasarkan bentuk *interactive governance* DPLH merumuskan *Interactive Governance* melalui penguatan kelembagaan dalam bentuk Surat Keputusan terkait ProKlim yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian Walikota Makassar menjadi tembusan. Pelaksanaan proklam yang di laksanakan di 3 lokasi yaitu RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea, RW 11 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang dan RW 05 Kel. Barombong Kec. Tamalate. Dimana dalam menjalankan ProKlim, Pemerintah Daerah wajib berkolaborasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Bentuk dari *interactive governance* ialah adaptasi, dijalankannya ProKlim karena merupakan bentuk kegiatan nyata yang dilakukan masyarakat

dalam membantu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang sangat berdampak pada pemanasan global. Selain bentuk adaptasi, Bentuk mitigasi yang dapat mengurangi resiko bencana dari kegiatan ProKlim ini salah satu diantaranya adalah masyarakat di lokasi ProKlim melakukan kegiatan penanaman kembali pohon di wilayah pegunungan yang telah gundul dan wilayah sekitar aliran sungai.

4. Masyarakat merupakan sasaran utama dalam kegiatan ProKlim tersebut, karena masyarakat itu sendirilah yang nantinya menjalankan ProKlim di lokasinya masing-masing Pelaksanaan kegiatan ProKlim diadakan setiap 1 kali dalam 1 tahun berjalan dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya ProKlim ini adalah selain membantu menyukseskan program Pemerintah Pusat yang melalui DPLH Sulsel adalah terbentuknya pola hidup atau kebiasaan untuk bertahan hidup dengan adanya perubahan iklim yang saat ini terjadi, yang mana sangat berdampak pada ketahanan pangan dan ekonimo masyarakat di wilayahnya masing-masing akibat dari pemanasan global.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran kepada:

1. Saran Untuk Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Kurangnya perhatian dan dukungan, maka untuk mengatasi masalah yang menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan Program Kampung Iklim di kota

makassar, sebaiknya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan mempromosikan atau mengenalkan secara luas ke publik tentang proklamasi.

## 2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya penulis menyarankan untuk lebih meneliti secara mendalam tentang Proklamasi sehingga tidak kekurangan dalam penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA


- Albar, I., Emilda, A., Tray, C. S., Sugiarto, A., & Haska, H. (2017). Road Map Program Kampung Iklim (PROKLIM). Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat ....
- Apriana, Y., Susanti, E., Ramadhani, F., & Surmaini, E. (2016). Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap Produksi Tanaman Pangan pada Lahan Kering dan Rancang Bangun Sistem Informasinya. *Informatika Pertanian*, 25(1), 69–80.
- Diposaptono, S. (2011). Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kelautan dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Dwiyanto, A. (2018). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi (2nd ed.). Yogyakarta: UGM press.
- Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. (2016). Critical reflections on interactive governance: Self-organization and participation in public governance. USA: Edward Elgar Publishing.
- Edelenbos, J., & Van Meerkerk, I. (2022). Normative considerations of interactive governance: effectiveness, efficiency, legitimacy and innovation. In *Handbook on Theories of Governance* (pp. 429–444). Edward Elgar Publishing.
- Eggers, W., & Goldsmith, S. (2004). Government by network: The new public management imperative. Deloitte Research and the Ash Institute for Democratic Governance and Innovation at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA.
- Faedlulloh, D. (2019). Program unggulan kampung iklim (proklam) berbasis pemberdayaan masyarakat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 28–44.
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*, eight edition. USA: West, a Thomson Business.
- Handoko, I., Sugiarto, Y., & Syaikat, Y. (2008). Keterkaitan perubahan iklim dan produksi pangan strategis. Bogor: SEAMEO BIOTROP.
- Harto, S. (1993). Analisis hidrologi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). Partisipasi politik di negara berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ilya, A., & Syahraki, S. (2020). *Digital Governance: Inovasi dengan Etika dan Integritas* (M. Akbar & F. Nova (eds.)). Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia.
- Kartasapoetra, A. G. (2017). *Klimatologi: Pengaruh iklim terhadap tanah dan tanaman* (6th ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2015). *Governance networks in the public sector* (1st ed.). Londo:Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315887098>
- Korten, D. C., Sjahrir, & Setiawan Abadi, A. (1993). *Pembangunan berdimensi kerakyatan*. Jakarta : yayasan Obor Indonesia.
- Las, I., Syahbuddin, H., Surmaini, E., & Fagi, A. M. (2008). *Iklim dan Tanaman Padi: Tantangan dan Peluang*. dalam: *Buku Padi: Inovasi Teknolohgi dan Ketahanan Pangan*. Subang: Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian.
- Murdiyarto, D. (2005). *Sepuluh tahun perjalanan negosiasi konvensi perubahan iklim* (2nd ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nuridin. (2011). *Antisipasi perubahan iklim untuk keberlanjutan ketahanan pangan*. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, 4(1), 21–31.
- Puspito, A. I. (2016). *Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rinaldy, R., Nulhaqim, S. A., & Gutama, A. S. (2017). *Proses community development pada program kampung iklim di desa cupang kecamatan gempol kabupaten cirebon (studi kasus program bank sampah dalam program kampung iklim)*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 129– 389. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14344>
- Surakusumah, W. (2011). *Perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati*. In *Makalah Perubahan Lingkungan Global*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Torfin, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sørensen, E. (2012). *Interactive governance: Advancing the paradigm*. oxford university Press on demand.
- Wahab, A. A. (2015). *Strategi Pengembangan Progran Kampung Iklim (PROKLIM) di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Uniersitas Hasanuddin.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
Jl. Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telpun (0411)450478-453208 Fax (0411)450478  
MAKASSAR 90231

---

Makassar, 19 Agustus 2022

Nomor	: 895.4/3813/DPLH	<i>Kepada</i>	
Lampiran	: -	Yth	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar
Perihal	: Tanggapan Izin Penelitian		

Di  
Makassar


Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Nomor : A.422/FSP/UNIBOS/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi yang disampaikan kepada kami, atas nama :

Nama	: ANITA SAID
NIM	: 4518021052
Judul Penelitian	: Interative Governance Dalam Program Kampung Iklim (Proklim) di Kota Makassar
Tempat	: Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Prinsipnya kami *Menerima* Mahasiswa untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.


Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS,**

 Pemerintah Provinsi  
**Sulawesi Selatan**  
Dokumen ini ditandatangani secara digital

**Ir. ANDI HASBI, MT**  
Pangkat. Pembina Utama Madya  
NIP. 19650427 199203 1 009

---

 Catatan :  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**



**Lampiran 2**  
**Hasil Wawancara**

**A. Judul Penelitian:**

**INTERACTIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
(PROKLIM) DI KOTA MAKASSAR**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk Interactive Governance dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di kota makassar?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk *Interactive Governance* dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di kota makassar.
2. Untuk mengetahui, pendeskripsian, dan analisis hasil partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar.

**D. Fokus Penelitian**

1. *Interactiv Governance* (Menurut Edelenbos & van Meerkerk, 2016).
  - a. Pemerintah
  - b. Masyarakat
2. Program Kampung Iklim (Menurut Kementerian Lingkungan dan kehutanan)
  - a. Adaptasi
  - b. Mitigasi

**E. Informan penelitian**

Dalam penelitian ini informan atau narasumber yang ditunjukkan adalah semua subjek yang berkaitan dengan Interactive Governance dalam Program

Kampung Iklim (PROKLIM) di kota Makassar, yaitu:

1. Kepala Sub Dinas Bina Program
2. Kepala bidang Tata Lingkungan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
4. Para Staf Subdin Bina Program
5. Para pelaku masyarakat yang menjadi binaan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar.

TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

No	Rumusan masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana bentuk <i>Interactive Governance</i> dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di kota makassar?	<i>Interactive Governance</i> (Menurut Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. Eds, 2016).	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1. Kepala Sub Dinas Bina Program 2. Kepala bidang Tata Lingkungan 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 4. Para Staf Subdin Bina Program 5. Para pelaku masyarakat yang menjadi binaan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar.	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi
2	1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar  ?	Program Kampung Iklim (Menurut Kementerian Lingkungan dan kehutanan)	1. Adaptasi 2. Mitigasi	1. Kepala Sub Dinas Bina Program 2. Kepala bidang Tata Lingkungan 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 4. Para Staf Subdin Bina Program 5. Para pelaku masyarakat yang menjadi binaan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL) di Kota Makassar.	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi

**Judul Penelitian :**

**INTERACTIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
(PROKLIM) DI KOTA MAKASSAR**

**A. *Interactive Governance* (Menurut Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. Eds, 2016).**

**1. Pemerintah**

- a. Apa saja masalah yang terjadi saat pelaksanaan Program Kampung Iklim ?

J : Masalah yang selalu menjadi kendala dan halangan dalam setiap pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah kurangnya perhatian dan dukungan dari pemangku kebijakan tiap daerah, salah satunya adalah kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup selaku OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjalankan Program Kampung Iklim.

- b. Siapa saja yang dilibatkan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel dalam Program Kampung Iklim ?

J : DPLH Sulsel selaku koordinator ProKlim di tingkat Provinsi melibatkan para pemangku kebijakan dalam pelaksanaannya di tingkat Kabupaten/ Kota dalam hal ini adalah para Kepala Daerah, Kepala OPD dan Masyarakat yang menjadi wilayah atau lokus ProKlim.

- c. Mengapa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel Melibatkan Perangkat Pemerintah dan Masyarakat Tersebut ?

J : Dalam menjalankan dan menyukseskan ProKlim, DPLH Sulsel wajib melibatkan Pemerintah sebagai pendukung kegiatan dalam bentuk kebijakan dan anggaran, selanjutnya masyarakat

yang terlibat yang menjalankan kegiatan ProKlim di lokusnya masing-masing

d. Dimana pelaksanaan Program Kampung Iklim di bagian wilayah kota Makassar ?

J : Lokasi yang menjadi fokus kegiatan ProKlim di Kota Makassar untuk tahun 2022 adalah

1. RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
2. RW 11 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang
3. RW 05 Kel. Barombong Kec. Tamalate

e. Bagaimana cara Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH Sulsel) dalam merumuskan bentuk *Interactive Governance* tentang Program Kampung Iklim (ProKlim) di kota Makassar ?

J : Peran DPLH Sulsel merumuskan *Interactive Governance* melalui penguatan kelembagaan dalam bentuk Surat Keputusan terkait ProKlim yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian Walikota Makassar menjadi tembusan.

## 2. Masyarakat

a. Apakah masyarakat ikut dalam menjadi sasaran dari kebijakan bentuk *interactive governance* yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH Sulsel)? Apa syarat dan ketentuannya ?

J : Masyarakat merupakan sasaran utama dalam kegiatan ProKlim tersebut, karena masyarakat itu sendirilah yang nantinya menjalankan ProKlim di lokusnya masing-masing. Syarat untuk menjadi Kampung Iklim dalam ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa.

Adapun ketentuannya harus melalui beberapa tahapan seperti :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi lokasi kampung iklim yang akan diusulkan untuk mengikuti Program Kampung Iklim.
  2. Melakukan pra penilaian ProKlim untuk mengetahui lokasi yang memiliki nilai awal yang tinggi dan kemudian dapat diusulkan dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN).
  3. Mendampingi Tim Sekretariat Pusat ProKlim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam proses verifikasi lokasi yang lolos dalam tahapan verifikasi.
- b. Siapa pembina masyarakat dalam Program Kampung Iklim yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH Sulsel) ?
- J : Pembina masyarakat dalam ProKlim adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota setempat yang melaksanakan ProKlim
- c. Mengapa masyarakat harus mengikuti kebijakan atau program yang dijalankan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH Sulsel) ?
- J : Mengikuti kebijakan atau program yang dijalankan oleh DPLH Sulsel adalah wajib, karena DPLH Sulsel merupakan koordinator dari semua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Kapan masyarakat melakukan pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH Sulsel) ?
- J : Pelaksanaan kegiatan ProKlim diadakan setiap 1 kali dalam 1 tahun berjalan dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

e. Di mana masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya Program Kampung Iklim yang *dilaksanakan* oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH Sulsel) ?

J : Manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya ProKlim ini adalah selain membantu menyukseskan program Pemerintah Pusat yang melalui DPLH Sulsel adalah terbentuknya pola hidup atau kebiasaan untuk bertahan hidup dengan adanya perubahan iklim yang saat ini terjadi, yang mana sangat berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing akibat dari pemanasan global dewasa ini.

f. *Bagaimana* masyarakat men gambil andil dalam kebijakan tersebut ?

J : Terlibat langsung dalam Tim atau Kelompok yang telah disusun dan dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota setempat melalui Kelompok Kerja (Pokja) wilayah masing-masing.

## **B. Program Kampung Iklim (Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**

### **1. Adaptasi**

a. Apa yang harus dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim ?

J : Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan masyarakat untuk beradaptasi dalam men ghadapi pemanasan global yang sedang terjadi di dunia saat ini khususnya Indonesia, yang mana salah satu bentuk adaptasinya adalah bagaimana masyarakat bisa dan terbiasa untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat men ghasilkan Gas Rumah Kaca di wilayahnya masing-masing.

b. Siapa saja yang dilibatkan dalam program tersebut ?

J : Selain masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan ProKlim ini, dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, ProKlim melibatkan berbagai sektor atau pihak yang mana DPLH Sulsel adalah leading sektornya. Adapun pihak yang terlibat adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Bappedalitbangda Sulsel, Dinas Kehutanan Sulsel, Dinas Pertanian Sulsel, Dinas Perhubungan.

c. Mengapa Program Kampung Iklim Harus Dijalankan ?

J : Karena ProKlim adalah bentuk kegiatan nyata yang dilakukan masyarakat dalam membantu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang sangat berdampak pada pemanasan global di bumi. ProKlim adalah salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk berperan serta membantu Program Dunia dalam mengurangi pemanasan global yang saat ini terjadi.

d. Kapan dampak itu bisa dirasakan dari program yang dilaksanakan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH Sulsel) ?

J : Dampak nyatanya dapat terasa setelah ProKlim ini berhasil dilaksanakan di tiap wilayah masing-masing yang telah melaksanakan ProKlim.

e. Dimana pelaksanaan itu dilakukan? Apakah dalam bidang pertanian atau lainnya?

J : Pelaksanaannya dilakukan di wilayah lokasi yang telah diusulkan dan telah memenuhi syarat dari Tim ProKlim Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kegiatan ProKlim ini memang melibatkan beberapa sektor selain Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah sektor

bidang Pertanian. Sektor yang lainnya adalah bidang Perhubungan, bidang Kelautan, Perindustrian.

f. Bagaimana Pemerintah Daerah Menjalankan Program Kampung Iklim ?

J : Dalam menjalankan ProKlim, Pemerintah Daerah wajib berkolaborasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, dimulai dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang kemudian DPLH Sulsel berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota masing-masing.

## 2. Mitigasi

a. Apakah komponen dari mitigasi memberikan dampak yang baik dalam hubungan lingkungan terhadap iklim ?

J : Komponen mitigasi tidak dapat dipisahkan dari ProKlim, karena kegiatan mitigasi merupakan unsur utama dalam ProKlim setelah kegiatan adaptasi. Bentuk kegiatan mitigasi itu merupakan upaya atau kegiatan-kegiatan langsung dalam membantu pengurangan emisi atau penyerapan karbon dalam Gas Rumah Kaca.

b. Siapa yang terlibat dalam komponen mitigasi ?

J : Dalam kegiatan mitigasi, semua pihak yang tergabung dalam Tim Kelompok Kerja ProKlim masing-masing wilayah wajib berperan serta aktif dalam mendukung kegiatan atau upaya-upaya mitigasi.

c. Mengapa pemerintah dapat mengurangi resiko dari perubahan iklim tersebut? Apakah mempunyai strategi khusus dalam menyikapinya ?

J : Strategi yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi resiko dari perubahan iklim dengan memberikan dukungan penuh kepada pihak-pihak yang mau dan terlibat dalam menyelesaikan



kegiatan ProKlim ini. Bentuk dukungan pemerintah itu antara lain membantu dalam pembuatan kebijakan yang mendukung kegiatan ProKlim, memberikan bantuan anggaran dalam pelaksanaan ProKlim, memberikan pendampingan selama pelaksanaan ProKlim.

d. Kapan proses mitigasi dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH Sulsel) dapat selesai ?

J : Selain adaptasi, kegiatan mitigasi merupakan kegiatan utama dalam ProKlim ini, kegiatan ProKlim diharapkan dapat terus berkesinambungan dan berjalan setelah lolos terverifikasi oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan ProKlim ini memiliki target Nasional sebanyak 20.000 Kampung Iklim di Indonesia pada tahun 2024.

e. Dimana letak mitigasi yang ditimbulkan oleh sumber daya dapat mengurangi resiko bencana disekitaran program pelaksanaan program?

J : Bentuk mitigasi yang dapat mengurangi resiko bencana dari kegiatan ProKlim ini salah satu diantaranya adalah masyarakat di lokasi ProKlim melakukan kegiatan penanaman kembali pohon di wilayah pegunungan yang telah gundul dan wilayah sekitar aliran sungai.

f. Bagaimana pemerintah memanfaatkan sumber daya air yang ada dalam mengurangi perubahan iklim ?

J : Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota dapat melakukan pemanfaatan sumber daya air yang ada di wilayah lokasi ProKlim melalui program-program yang mendukung kegiatan pertanian.

**Judul Penelitian :**

**INTERACTIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
(PROKLIM) DI KOTA MAKASSAR**

**PANDUAN OBSERVASI**

**A. Observasi Umum Lokasi Penelitian**

1. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (DPLH SULSEL)

**B. *Interactive Governance* (Menurut Edelenbos & van Meerkerk, 2016).**

- a. Perumusan bentuk *interactive governance*.
- b. Sasaran dan Kebijakan *interactive governance*

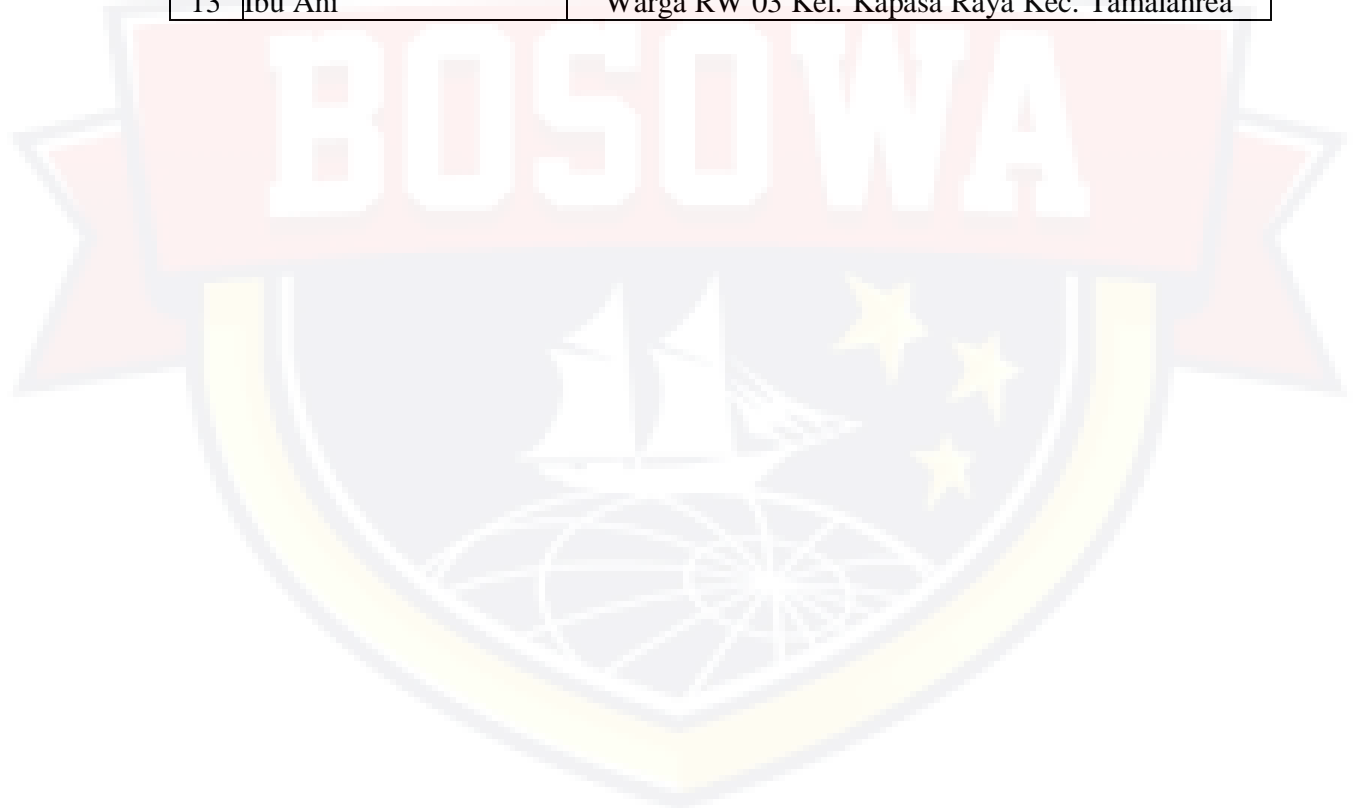
**C. Program Kampung Iklim (Menurut Kementerian Lingkungan dan kehutanan)**

- a. Perubahan iklim
- b. Hubungan lingkungan terhadap iklim

Lampiran 4: Daftar Nama dan Asal Informan

**DAFTAR NAMA DAN ASAL INFORMAN**

No.	Nama	Asal
1.	Bpk. Muh. Fajar	Kepala Sub Bagian Program
2.	Bpk. Sulman	Sekretaris Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup SULSEL
3.	Bpk. Baharuddin	Ketua RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
4.	Bpk. Abd. Rahman	Warga RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
5.	Bpk. Mursalim	Warga RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
6.	Ibu Sarina	Warga RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
7.	Ibu Santi	Warga RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
8.	Ibu Hasna	Warga RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
9.	Ibu Surianti	Warga RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
10.	Bpk. Ismail	Warga RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
11.	Bpk. Ridwan	Warga RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
12.	Ibu Sitti	Warga RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea
13.	Ibu Ani	Warga RW 03 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea



## Lampiran 5 Pernyataan Telah diwawancarai

### PERNYATAAN TELAH DIWAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang bernama Anita Said, dengan judul “Interactive Governance dalam Program Kampung Iklim (Proklim) di kota Makassar”.

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negative dan data mengenai dari saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang dicantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang mengetahui kerahasiaan data-data penelitian. Demikian, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Makassar, 2022

**Lampiran 6**  
**Dokumentasi Pengambilan Data**





